



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GOWA



Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN, SH., MH
BUPATI GOWA

H. ABD. RAUF MALAGANNI, S.Sos., M.Si
WAKIL BUPATI GOWA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2023



BUPATI GOWA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan taufiq-Nya semua aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa, termasuk dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gowa ini sebagai laporan atas pelaksanaan program kerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, tugas umum pemerintahan maupun tugas pembantuan, serta laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat, maka penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan suatu kewajiban konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69, sedangkan sistematika pelaporan dan waktu penyampaiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana substansi dari laporan ini merupakan progres report atas pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintahan yang dilaksanakan, dengan beberapa permasalahan yang dihadapi disertai solusi yang dilakukan, maupun tingkat kemajuan serta prestasi yang telah diraih.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gowa Tahun 2023 ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui tahapan revidi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa.

Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah, hal ini dapat kita rasakan dari banyaknya program yang menyentuh langsung kepada masyarakat yang terus dilaksanakan seperti program pendidikan gratis, program kesehatan gratis, program pencerahan qolbu jum'at ibadah, program kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim putra putri terbaik kita untuk disekolahkan dengan dibiayai oleh pemerintah, Program satu sarjana satu desa dan satu kelurahan serta program Pendidikan mahasantri.



Akhirnya kami menyadari sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu kami sangat berharap adanya masukan, kritik dan saran konstruktif agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Kabupaten Gowa dapat lebih maju dan lebih berhasil.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungguminasa, Maret 2024

BUPATI GOWA,



Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 PENJELASAN UMUM	2
1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6
1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	18
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	24
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO	24
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	24
2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	25
2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL.....	59
2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	70
2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH.....	72
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	125
3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA	125
3.2 TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA	127
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	128
4.1 URUSAN PENDIDIKAN.....	128
4.2 URUSAN KESEHATAN	129
4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	131
4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	133
4.5 URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	134
4.6 URUSAN URUSAN SOSIAL	136
4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN	138
BAB V PENUTUP	141



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya undang - undang tersebut juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, dengan definisi kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, yang sesuai dengan tuntutan zaman yang tidak terhindarkan. Selain karena landasan filosofinya mengarah pada peningkatan demokrasi dan kinerja daerah, otonomi daerah juga dipandang akan mengurangi beban pemerintah pusat.

Secara umum Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk mengevaluasi proses serta perkembangan penyelenggaraan kewenangan daerah dan juga sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan di daerah dan antara Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif di daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di daerah.

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah disebutkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa "*Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*".

Atas dasar tersebut, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 disusun untuk menjelaskan arah prioritas pembangunan daerah yang meliputi visi, misi, arah kebijakan, strategi dan prioritas serta program kerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan, sehingga secara terperinci nampak hasil - hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan masalah dan berbagai hal yang dianggap penting selama tahun 2023.

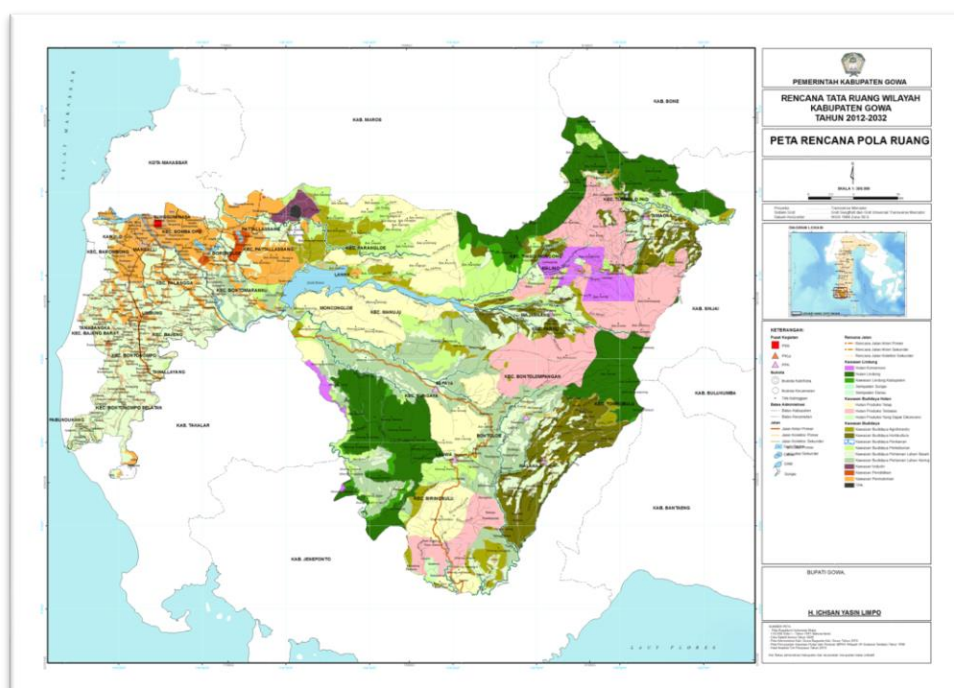
1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. UNDANG - UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Wilayah Kabupaten Gowa terbentuk berdasarkan Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi.

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Kabupaten Gowa berada pada 119,3773° Bujur Barat dan 120,0317° Bujur Timur serta 5,0829342862° Lintang Utara dan 5,577305437° Lintang Selatan; di mana wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.883,33 km², atau setara dengan 4,02% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.



Sumber data : RTRW Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032

Keadaan geografis wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas dataran tinggi seluas 1.509,87 km² atau setara dengan 80,17% yang meliputi sembilan kecamatan yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah seluas 373,46 km² atau setara dengan 19,83% yang juga terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu dan Pattallassang. Kabupaten Gowa berbatasan dengan 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone;



- Sebelah Timur dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

Letak wilayah administrasi menempatkan Kabupaten Gowa pada posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar) yang merupakan pusat pelayanan jasa dan perdagangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Posisi strategis ini menjadikan Kabupaten Gowa memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang berdampak signifikan terhadap percepatan peningkatan aktivitas sosial kemasyarakatan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Gowa.

C. JUMLAH PENDUDUK

Penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2023 tercatat sebanyak 799.999 jiwa yang terdiri dari 380.564 jiwa penduduk laki-laki, dan 390.604 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Angka perbandingan penduduk laki - laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) sebesar 96,96 ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki-laki.

Tabel 1.1. Data Penduduk di Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2023

RINCIAN	2021	2022	2023
1. Jumlah Penduduk	768.868	787.917	799.999
a. Laki-laki (jiwa)	380.564	390.604	396.130
b. Perempuan (jiwa)	388.304	397.857	403.869
2. Kepadatan/Km ² (Jiwa/Km ²)	397	397	397
3. Rata-rata Anggota Rumah Tangga (jiwa/RT)	4	4	4

Sumber : Data Diolah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa, 2022.

Kepadatan penduduk yang merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah dan dinyatakan dalam satuan jiwa per kilometer. Kepadatan penduduk dapat dijadikan parameter tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah. Pada tahun 2023 kepadatan penduduk Kabupaten Gowa adalah 397 jiwa/km². Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepadatan penduduk adalah faktor lingkungan, historis dan sosio kultural.

Penduduk Kabupaten Gowa mayoritas beragama Islam memiliki jiwa dan semangat pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi dengan ketaatan dalam melaksanakan ajaran dan nilai-nilai agama. Kondisi ini telah terbentuk sejak lama dan telah melahirkan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepahlawanan dalam pengabdian kepada masyarakat, yaitu Sultan Hasanuddin Raja Gowa XIV dengan gelar Ayam Jantan dari Timur bernama asli I Mallombassi Daeng Mattawang, seorang sufi penyebar Agama Islam ternama Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Al Makassar serta Karaeng Pattingalloang.

Jiwa kepahlawanan yang dimiliki oleh **Sultan Hasanuddin** dan ajaran nilai-nilai agama yang ditanamkan oleh **Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Al Makassar**, serta Kecerdasan **Karaeng Pattingalloang** yang dapat menguasai berbagai Bahasa didunia membuat ketiganya diangkat oleh negara sebagai



Pahlawan Nasional. Kedua tokoh tersebut telah melahirkan jiwa kepahlawanan yang menjiwai nurani masyarakat Gowa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bernegara.

D. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, 121 desa, 46 kelurahan, dan 675 dusun/lingkungan.

E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah didukung oleh 3 (tiga) Staf Ahli; Sekretariat Daerah yang membawahi 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Inspektorat Daerah; 24 (dua puluh empat) Dinas dan 6 (enam) Badan serta ditambah dengan 18 (delapan belas) Pemerintahan Kecamatan. Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebanyak 6.990 Orang.

F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kabupaten Gowa ditempuh dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Oleh karena itu, kebijakan optimalisasi pendapatan daerah diarahkan untuk melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintah daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya, sehingga substansi dari aturan tersebut adalah mempertegas dan memperjelas ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah dengan desentralisasi pengelolaan keuangan sampai dengan tingkat manajemen terendah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas/Badan/Sekretariat serta Kecamatan dan menuntun kita dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, sedangkan wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran dan barang di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Kemudian dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan secara realistis sesuai potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing unit kerja/pengelola



pendapatan. Di samping itu, dilakukan pula pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan ekstensifikasi sumber PAD baru yang tidak memberatkan masyarakat serta memperhitungkan kebijakan ekonomi biaya tinggi; meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan; pendayagunaan asset-asset daerah yang dapat menghasilkan PAD; mempertahankan keseimbangan antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan, memobilisir potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata. Prinsip prudential atau kehati-hatian dalam menggunakan sumber dana menjadi komitmen bersama. sehingga dalam merencanakan anggaran belanja benar-benar diupayakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan demikian, dalam melaksanakan pembiayaan, strategi yang ditempuh dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2023 jumlah Pendapatan direncanakan sebesar Rp.1.909.789.269.965,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.900.334.191.893,62 atau sebesar 99,50 persen yang terdiri dari :

- a. **Pendapatan Asli Daerah** yang ditargetkan Rp.319.592.466.639,00 telah terealisasi sebesar Rp.323.069.408.079,66 atau 101,09 persen, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.163.538.581.430,00 dengan realisasi sebesar Rp.164.206.807.418,20 atau 100,41 persen.
 - Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp.96.443.227.675,00 dengan realisasi sebesar Rp.95.428.102.594,00 atau 98,95 persen.
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.5.072.397.358,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.892.197.358,00 atau 96,45 persen.
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.54.538.260.176,00 dengan realisasi sebesar Rp.48.542.300.709,46 atau 107,34 persen.
- b. **Pendapatan Transfer** dari target sebesar Rp.1.590.196.803.326,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.577.264.783.813,96 atau 99,19 persen, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dari target Rp.1.439.660.287.416,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.435.177.036.910,00 atau 99,69 persen.
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah, dari target Rp.150.536.515.910,00 dengan realisasi sebesar Rp.142.087.746.903,96 atau 94,39 persen.
- c. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**, dengan target sebesar Rp.,00 dengan realisasi sebesar Rp.,00 atau 0 persen.

2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH



Pengelolaan Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Fokus kebijakan umum keuangan daerah pada tahun anggaran 2020 adalah peningkatan profesionalisme dan kinerja pengelolaan belanja daerah yang tetap mengacu pada otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Jumlah kebutuhan Belanja untuk Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.2.170.826.662.074,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.996.144.644.316,77 atau 91,95 persen dari yang dianggarkan yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1.476.897.391.665,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.351.452.988.937,83 atau 91,51 persen dari yang dianggarkan.

b. Belanja Modal

Untuk tahun anggaran 2023 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 477.696.011.830,00 dengan realisasi sebesar Rp. 433.647.190.660,94 atau 90,78 persen dari yang dianggarkan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.7.065.259.876,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.755.477.109,00 atau 39,00 persen dari yang dianggarkan.

d. Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.209.167.998.703,00 dengan realisasi sebesar Rp. 208.288.987.609,00 atau 99,58 persen dari yang dianggarkan.

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu aturan - aturan yang dibuat oleh Pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Adapun strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2021 - 2026 yang tertuang dari beberapa misi sebagai berikut:

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif

1) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan dasar pendidikan“, diterapkan:

Strategi 1 : Meningkatkan akses, kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata, terjangkau dan berkarakter, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan mutu proses pembelajaran dan penumbuhan budaya literasi pada satuan pendidikan.

2) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat“, diterapkan:

Strategi 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat baik bersifat kuratif, promotif maupun preventif, meningkatkan kuantitas dan kapasitas tenaga medis dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesehatan.

3) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Daerah “, diterapkan:



Strategi 3 : Meningkatkan akselerasi pembangunan pemuda, pengarusutamaan hak-hak anak baik akses, partisipasi, manfaat maupun control dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

MISI 2: Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi

- 4) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor komoditas unggulan daerah”, diterapkan:

Strategi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yaitu sektor pertanian, pariwisata dan UMKM, pengembangan inovasi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

- 5) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah”, diterapkan:

Strategi 5 : Meningkatkan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk penyediaan informasi bursa kerja dan pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan.

- 6) Untuk mencapai sasaran “Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu serta usaha mikro dan kecil, diterapkan:

Strategi 6 : Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat marginal dan meningkatkan program atau kegiatan perlindungan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.

- 7) Untuk mencapai sasaran “Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat”, diterapkan:

Strategi 7 : Mendorong lebih banyak dan lebih baik kualitas pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat dengan menjalin kemitraan antara pihak pengusaha dengan UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.

MISI 3: Meningkatkan Infrastruktur Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan

- 8) Untuk mencapai sasaran “Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi”, diterapkan:

Strategi 8 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur melalui pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga dan kesenian, pariwisata, kesehatan, perumahan rakyat serta pelibatan masyarakat dalam pemeliharaannya.

- 9) Untuk mencapai sasaran “Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan”, diterapkan:

Strategi 9 : Meningkatkan aktivitas pembangunan dan pembinaan masyarakat desa dan pengembangan ketersediaan akses layanan publik dan akses kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan menuju terciptanya desa maju dan mandiri.

- 10) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”, diterapkan:

Strategi 10 : Meningkatkan perlindungan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan penanganan bencana terutama banjir dan longsor dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan.

**MISI 4: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**

11) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik“, diterapkan:

Strategi 11 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kualitas layanan publik melalui pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

12) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah“, diterapkan:

Strategi 12 : Meningkatkan kualitas layanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penyederhanaan birokrasi, penerapan manajemen kinerja, pengelolaan keuangan dan aset, meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur serta penerapan teknologi dan komunikasi.

B. VISI DAN MISI KABUPATEN GOWA

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan. Visi sangat terkait dengan cita-cita atau keinginan suatu daerah untuk menggunakan seluruh potensinya yang dideskripsikan secara ringkas dan jelas yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan. Penjabaran mengenai visi yang menjadi tujuan dalam konteks perencanaan strategis senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang dianut organisasi. Kabupaten Gowa sebagai perwujudan organisasi pemerintah daerah, telah mengejawantahkan nilai-nilai kultural dan historis yang dimiliki menjadi sumber inspirasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Bertitik tolak dari filosofi itu pula yang mendasari pembangunan Kabupaten Gowa untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam perspektif jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025, yakni mencapai visi mewujudkan **“Gowa Menjadi Andalan Sulawesi Selatan dan Sejajar Daerah Termaju di Indonesia dalam Mensejahterakan Masyarakat”**.

Untuk mewujudkan visi di atas, telah ditetapkan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Gowa, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing daerah
2. Mendorong kemandirian pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mengembangkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Strategi untuk pelaksanaan visi daerah tersebut telah memasuki tahapan terakhir periode lima tahunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan dua tahapan periode lima tahunan sebelumnya (2005-2010 dan 2010-2015). Untuk mencapai visi jangka panjang daerah tersebut, maka dalam perumusan Visi RPJMD periode pertama ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian RPJMD 2 (dua) periode sebelumnya serta isu dan permasalahan strategis yang dihadapi pada tahun 2021-2026.

Selanjutnya bertolak dari kondisi aktual dewasa ini dan merujuk pada Visi Bupati/Wakil Bupati Gowa terpilih serta dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yaitu **“Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”** dan Visi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**, maka dirumuskan visi lima tahunan Kabupaten Gowa yang



merupakan penuntun dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai pengejawantahan dari cita-cita dan aspirasi masyarakat di daerah ini yang telah dikrisialisasikan dan diformulasikan dalam perspektif 5 (lima) tahun ke depan. Adapun **Visi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026** yaitu **“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”**.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengetahui program-program dan hasil yang dapat diperoleh di masa yang depan. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki Kabupaten Gowa, dirumuskan Misi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas

Misi “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya.

Misi “Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Misi “Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Misi “Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Misi “Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Misi “Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas” yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas birokrasi.



C. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengacu pada prioritas pembangunan provinsi dan nasional sebagaimana tertuang dalam rencana kerja pemerintah dan rencana pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Gowa di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 menetapkan tema pembangunan yaitu **“Pemulihan Sosial Ekonomi Berkelanjutan di Dukung Penguatan Sumber Daya Manuasi, Pemanfaatan Infrastruktur dan Peningkatan Daya Saing Daerah”**. Selanjutnya mengacu pada visi dan misi serta tema pembangunan tersebut ditetapkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2023 yaitu:

1. Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan inklusif
3. Pembangunan insfrastruktur dan penataan ruang
4. Pelayanan kesejahteraan social dan penanggungan kemiskinan
5. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program prioritas pembangunan daerah tersebut diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis tahun 2023, antara lain:

1. Mendekatkan pelayanan Publik Bagi Seluruh Masyarakat
2. Kualitas Infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian
3. Pemerataan pendapatan bagi masyarakat kabupaten gowa
4. Sumber daya Manusia (SDM) yang berkualitas

Tabel 1.1
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023

N O	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD
1	Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan perekonomian	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Program pemasaran pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak kekayaan intelektual	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
--	--



N O	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Hubungan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



N O	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			Industrial	
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, UsahaKecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
2.	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan inklusif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan danKesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Perkebunan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pemberdayaan Masyarakat BidangKesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program	Dinas Pengendalian



N O	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			Pengendalian Penduduk	Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
4.	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang;	Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perhubungan
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentataan Ruang
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran



N O	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentataan Ruang
5.	Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Penanganan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



N O	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			Khusus Anak	Perlindungan Anak
6.	Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan DanAsistensi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Setda)	Sekretariat Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan dan Bagian Kesra
			Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Program Penyelenggaraan	Dinas Komunikasi, Informatika dan



N O	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			Statistik Sektoral	Persandian
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Perijinan Penggunaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu atap
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu atap



N O	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Pemerintahan
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian

Sumber : RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023.

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat, Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas (2) dua jenis urusan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Kebijakan terkait dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pasal ini disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Kemudian dalam Pasal 9 Ayat (3) menyebutkan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam Pasal 11 Ayat (2) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam Pasal 18 Ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintah Daerah



memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam Ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Cakupan pelayanan dasar sebagaimana urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Pengaturan standar pelayanan dalam kategori minimal dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang kemudian secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan harus mampu dicapai oleh setiap daerah sesuai dengan batas waktu capaian yang ditentukan. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Gowa untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Di Kabupaten Gowa SKPD pelaksana SPM adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Sosial.

B. DASAR HUKUM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa antara lain sebagai berikut :

1. UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Undang - undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah, non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri atau menteri koordinasi berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan nomenklatur seperti departemen, kementerian negara, lembaga pemerintah non



kementerian maupun instansi pemerintah lain termasuk lembaga nonstruktural.

2. UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Otonomi Daerah menjadi sangat penting berkaitan dengan upaya peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pelaksanaan pembangunan agar terwujud desentralisasi yang dapat menghasilkan peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan guna semakin mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menghadapi dinamika kehidupan, baik di dalam maupun di luar negeri, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai prinsip - prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Upaya ini merupakan langkah strategis sekaligus peluang bagi daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam upaya mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi rujukan pelaksanaan SPM adalah urusan wajib pelayanan dasar.

4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.

5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, keterkaitan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budget*) oleh pemerintah daerah, lebih sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Petunjuk teknis terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal meliputi format laporan penerapan standar pelayanan minimal pemerintah daerah serta target dan indikator penerima layanan standar pelayanan minimal.

7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025

RPJPD Kabupaten Gowa 2005 - 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan.
- Terwujudnya keterpaduan, konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.
- Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- Menjaga kesinambungan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan per lima tahunan.

8. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan Potensi Daerah.

9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

Penetapan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk mengarahkan seluruh pelaku pembangunan baik bagi jajaran pemerintah, masyarakat maupun swasta untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya secara lebih terarah, terukur dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan daerah selama kurun waktu 2021-2026.



10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah merupakan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif memuat program kerja tahunan dan menjadi pedoman kerja dan sekaligus sebagai indikator kinerja yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 2023.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa, sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa yang diturunkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023. Selain itu, juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2023, serta digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2023 dapat semakin mengarah pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa serta pada pencapaian Visi Kabupaten Gowa yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbaik.

Kebijakan umum daerah Kabupaten Gowa dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal telah dituangkan dalam RPJMD yang digambarkan sebagai berikut:

1. Kebijakan umum di bidang pendidikan yaitu peningkatan sarana dan prasarana layanan pendidikan berkualitas serta kemudahan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi,
2. Kebijakan umum di bidang kesehatan yaitu peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan berkualitas beserta sarana penunjang kesehatan.
3. Kebijakan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu peningkatan



penataan infrastruktur perkotaan yang didukung dengan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan dan pengendalian lingkungan hidup.

4. Kebijakan umum di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu pengembangan dan pemeliharaan nilai-nilai budaya lokal masyarakat, pembinaan mental spiritual masyarakat serta penyebarluasan informasi produk-produk hukum kepada masyarakat.
5. Kebijakan umum di bidang sosial yaitu pemberian bantuan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial.



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut ini:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Gowa

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,44	73,01	0,57%
2	Angka Kemiskinan	7,36%	7,42%	0,06%
3	Angka Pengangguran	3,26%	3,43%	0,17%
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,59%	5,82%	1,23%
5	Pendapatan Perkapita	Rp 32.495.800,00	Rp 35.517.400,00	1,01%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,36	0,32	12,08%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Gowa, 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa berada di angka 73.01 naik 0.57 persen dibandingkan pada tahun 2022 yang berada di angka 72.44. Hasil ini menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk hasil pada angka kemiskinan di Kabupaten Gowa. Pada tahun 2023 angka kemiskinan berada pada posisi 7.42%, mengalami kenaikan sebesar 0.06 % dari tahun 2022 yang berada pada posisi 7.36%. Angka Pengangguran di Kabupaten Gowa pada tahun 2023 adalah 3.43% naik 0.17% dari tahun 2022 yang berada pada 3.26%. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 berada pada 5.82% naik 1.23% dari tahun 2022 yang berada pada 4.59%. Badan Pusat Statistik mencatat besaran pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Gowa pada tahun 2022 sebesar Rp 32.495.800,00 sedangkan untuk tahun 2023 naik 1.01% menjadi sebesar Rp 35.517.400,00 dan ketimpangan pendapatan atau dikenal dengan *gini ratio* Kabupaten Gowa berada pada posisi 0.36 pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 telah turun dan berada pada posisi 0.32.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

**2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN**

Adapun capaian indikator kinerja kunci keluaran dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Kunci Keluaran Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.	
1	2	3	4	5	6	
1	Pendidikan	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
		1	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi (Negeri dan Swasta)	464 Lembaga	Dinas Pendidikan	
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Dinas Pendidikan	
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	25.274 Org	Dinas Pendidikan	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	790 Org	Dinas Pendidikan	
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1.024 Org	Dinas Pendidikan	
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	737 Org	Dinas Pendidikan	
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	161 Org	Dinas Pendidikan	
			2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
		1	Jumlah SD Negeri terakreditasi	335	Dinas Pendidikan	
		2	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Dinas Pendidikan	
		4	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	75.536 Org	Dinas Pendidikan	
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	4.123 Org	Dinas	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

			Pendidikan	
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2.922 Org	Dinas Pendidikan	
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.577 Org	Dinas Pendidikan	
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	19 Org	Dinas Pendidikan	
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.408 Org	Dinas Pendidikan	
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	388 Org	Dinas Pendidikan	
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	312 Org	Dinas Pendidikan	
3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah				
1	Jumlah SMP Negeri terakreditasi	122	Dinas Pendidikan	
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Dinas Pendidikan	
5	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	28.278 Org	Dinas Pendidikan	
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	929 Org	Dinas Pendidikan	
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.412 Org	Dinas Pendidikan	
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	929 Org	Dinas Pendidikan	
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	348 Org	Dinas Pendidikan	
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	738 Org	Dinas Pendidikan	
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	73 Org	Dinas Pendidikan	
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA	165 Org	Dinas Pendidikan	



		4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	30 Lembaga	Dinas Pendidikan	
	2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.543 Org	Dinas Pendidikan	
	3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2.543 Org	Dinas Pendidikan	
	4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	545 Org	Dinas Pendidikan	
	5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	453 Org	Dinas Pendidikan	
	6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	453 Org	Dinas Pendidikan	
	7	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Tidak Perlu Diisi		
	8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Tidak Perlu Diisi		
2	Kesehatan	1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan			
	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	4 Unit	Dinas Kesehatan	
		2 Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			
	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3 Unit	Dinas Kesehatan	
		3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			
	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8 Jenis	Dinas Kesehatan	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal sesuai standar	479 Org	Dinas Kesehatan	
		4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			
	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	Dinas Kesehatan	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	546 Org	Dinas Kesehatan	



5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	559 Org	Dinas Kesehatan	
6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	22 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	527 Org	Dinas Kesehatan	
7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	326 Org	Dinas Kesehatan	
8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	235 Org	Dinas Kesehatan	
9 Persentase usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	293 Org	Dinas Kesehatan	
10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	213 Org	Dinas Kesehatan	



		11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
1		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 Jenis	Dinas Kesehatan	
2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	230 Org	Dinas Kesehatan	
		12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
1		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis	Dinas Kesehatan	
2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	48 Org	Dinas Kesehatan	
		13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			
1		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 Jenis	Dinas Kesehatan	
2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	28 Org	Dinas Kesehatan	
		14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			
1		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 Jenis	Dinas Kesehatan	
2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	105 Org	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota			
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR
		5	Rencana Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR



	6	Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota				
	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	5	Rencana Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	6	Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				
	1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	37,50 %	Dinas PUPR	
	2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	9,28 %	Dinas PUPR	
	3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	100 %	Dinas PUPR	
	4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				
	1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
	2	Tersusunnya dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
	3	Jumlah BUMD dan UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	PDAM Tirta Je'neberang	Dinas PUPR	



	4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak Ada	Dinas PUPR	
	5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain	Tidak Ada	Dinas PUPR	
	5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	1.039 RT	Dinas PUPR	
	2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	2.563 RT	Dinas PUPR	
	3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	3.602 RT	Dinas PUPR	
	4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	3.602 RT	Dinas PUPR	
	7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar	96,18 %	Dinas PUPR	
	8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman	0 %	Dinas PUPR	
	9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0 %	Dinas PUPR	
	11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Belum ada pengangkutan	Dinas PUPR	
12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Belum ada	Dinas PUPR		
13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Belum Ada Jasa Penyedotan	Dinas PUPR		
14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Belum Ada Jasa Penyedotan	Dinas PUPR		



6 Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota				
1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	12,30 %	Dinas PUPR	
2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	152 IMB	Dinas PUPR	
3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Perda No. 4 Tahun 2014	Dinas PUPR	
4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Belum Ada	Dinas PUPR	
5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Belum Ada	Dinas PUPR	
6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Belum Ada	Dinas PUPR	
7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	105 Unit	Dinas PUPR	
8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara dan dirawat	8 Unit	Dinas PUPR	
7 Tingkat kemandapan jalan kabupaten/kota				
1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kab/kota	89,26 %	Dinas PUPR	
2	Panjang jalan yang dibangun	5,85 km	Dinas PUPR	
3	Panjang jembatan yang dibangun	23 m	Dinas PUPR	
4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	7,96 km	Dinas PUPR	
5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	35 m	Dinas PUPR	
6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	45,52 km	Dinas PUPR	
7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Tidak ada	Dinas PUPR	
8	Panjang jalan yang dipelihara	34,78 km	Dinas PUPR	
9	Panjang jembatan yang dipelihara	52 m	Dinas PUPR	



		8 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
	1	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1 Kegiatan	Dinas PUPR	
	2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	30 Orang	Dinas PUPR	
	3	Jumlah tenaga konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	30 Orang	Dinas PUPR	
	4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada	Dinas PUPR	
	7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	Dinas PUPR	
	8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	Dinas PUPR	
	9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
	10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada	Dinas PUPR	
	11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	Dinas PUPR	
	12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	Dinas PUPR	
	13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
	14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	222 Kegiatan Proyek	Dinas PUPR	
	16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUPR	



		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUPR		
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUPR		
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada Kecelakaan	Dinas PUPR		
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		9 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi					
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota					
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Tidak Ada	Dinas Perkimtan		
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	75 Rumah	Dinas Perkimtan		
		3	Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	75 Rumah	Dinas Perkimtan		
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	75 Rumah	Dinas Perkimtan		
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	75 Rumah	Dinas Perkimtan		
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	Dinas Perkimtan		
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak Ada	Dinas Perkimtan		



	8	Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi	75 Rumah	Dinas Perkimtan	
	9	Jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak Ada	Dinas Perkimtan	
	2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota				
	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	5 RT	Dinas Perkimtan	
	2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Perkimtan	
	3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Perkimtan	
	4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Perkimtan	
	5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dinas Perkimtan	
	6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0,032 Ha	Dinas Perkimtan	
	3 Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani				
	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	707,22 Ha	Dinas Perkimtan	
	2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	279 Unit	Dinas Perkimtan	
	3	Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	396,04 Ha	Dinas Perkimtan	
	4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)				
	1	Jumlah rumah di kabupaten/kota	144.977 Unit	Dinas Perkimtan	
	2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	279 Unit	Dinas Perkimtan	
	3	Jumlah rumah tidak layak huni	38.750 Unit	Dinas Perkimtan	
	4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0 Unit	Dinas Perkimtan	



		5	Rasio rumah dan KK	1.70	Dinas Perkimtan		
		6	Jumlah rumah pembangunan baru	3695 Unit	Dinas Perkimtan		
		5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	230 Unit	Dinas Perkimtan		
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	33 Unit	Dinas Perkimtan		
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	45 Pengembang	Dinas Perkimtan		
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	45 Pengembang	Dinas Perkimtan		
		9	Jumlah pengembang yang mendapatkan penyuluhan atau pelatihan	15 Pengembang	Dinas Perkimtan		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan					
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani	113 Kasus	Satpol PP		
		2	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	26 Orang	Satpol PP		
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	14 Perda	Satpol PP		
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3 Orang	Satpol PP		
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada, 2 SOP	Satpol PP		
		6	Tersedianya sarana dan prasarana minimal	344 Buah	Satpol PP		
		2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan					



		3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0 %	BPBD	
	2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	BPBD	
		4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0 %	BPBD	
	2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100 %	BPBD	
	3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,45 %	BPBD	
	4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,30 %	BPBD	
	5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	71,02 %	BPBD	
	6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	15,58 %	BPBD	
		5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0 %	BPBD	
	2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	BPBD	
	3	Persentase jumlah petugas aktif dalam penanganan darurat bencana	100 %	BPBD	
	4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100 %	BPBD	
		6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten/kota	1 Jenis	Dinas Damkar	
	2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana dan prasarana damkar, sarana dan prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada di 1 Kecamatan	Dinas Damkar	
	3	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Dinas Damkar	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana/prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Tidak Ada	Dinas Damkar		
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	11 Jenis	Dinas Damkar		
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	55 Orang	Dinas Damkar		
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	60 Orang	Dinas Damkar		
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Tidak Ada Kegiatan	Dinas Damkar		
		7 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran					
6	Sosial	1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1 Unit	Dinas Sosial		
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	216 Orang	Dinas Sosial		
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2 Tim	Dinas Sosial		
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	216 Orang	Dinas Sosial		
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang berakses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 Unit	Dinas Sosial		
		6	Jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	200 Orang	Dinas Sosial		
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Tidak Ada	Dinas Sosial		
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Tidak Ada	Dinas Sosial		
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	12 Orang	Dinas Sosial		
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Tidak Ada	Dinas Sosial		
		11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Tidak Ada	Dinas Sosial		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Tidak Ada	Dinas Sosial	
	13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak Ada	Dinas Sosial	
	14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	25 Orang	Dinas Sosial	
	15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	45 Orang	Dinas Sosial	
	16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	3 Orang	Dinas Sosial	
	17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	17 Orang	Dinas Sosial	
	18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	76 Orang	Dinas Sosial	
	19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	9 Orang	Dinas Sosial	
	20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	5 Orang	Dinas Sosial	
	21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	4 Orang	Dinas Sosial	
	2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota				
1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	705 KK	Dinas Sosial		
2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	705 KK	Dinas Sosial		
3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Tidak Ada	Dinas Sosial		
	4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Tidak Ada	Dinas Sosial	
	5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Tidak Ada	Dinas Sosial	
	6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	80 Orang	Dinas Sosial	



7	Tenaga Kerja	1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	Ada	Dinas Nakertrans
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0%	Dinas Nakertrans
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Belum Ada	Dinas Nakertrans
		2 Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi			
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100%	Dinas Nakertrans
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	54.54%	Dinas Nakertrans
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	9.09%	Dinas Nakertrans
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	26.66%	Dinas Nakertrans
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%	Dinas Nakertrans
		6	Jumlah penganggur yang dilatih	363 Orang	Dinas Nakertrans
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	Dinas Nakertrans
		8	Persentase penyerapan lulusan	100%	Dinas Nakertrans
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	20.66%	Dinas Nakertrans
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0 Orang	Dinas Nakertrans
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0 Orang	Dinas Nakertrans
		3 Tingkat produktivitas tenaga kerja			
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100%	Dinas Nakertrans
		2	Data tingkat produktivitas total		Dinas Nakertrans



4 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	10,75%	Dinas Nakertrans	
2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	33,33%	Dinas Nakertrans	
3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	3 Buah	Dinas Nakertrans	
4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100%	Dinas Nakertrans	
5	Persentase perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100%	Dinas Nakertrans	
6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0%	Dinas Nakertrans	
7	Jumlah mogok kerja	Tidak Ada	Dinas Nakertrans	
8	Jumlah penutupan perusahaan	1 Unit	Dinas Nakertrans	
9	Jumlah perselisihan kepentingan	0 Kasus	Dinas Nakertrans	
10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0 Kasus	Dinas Nakertrans	
11	Jumlah perselisihan PHK	0 Kasus	Dinas Nakertrans	
12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	0 Orang	Dinas Nakertrans	
13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0 Kasus	Dinas Nakertrans	
14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Tidak Ada	Dinas Nakertrans	
15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0%	Dinas Nakertrans	
5 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota				
1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	57 Buah	Dinas Nakertrans	
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota	1.578 Orang	Dinas Nakertrans	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		3	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kabupaten/kota	8 Unit	Dinas Nakertrans		
		4	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0 Orang	Dinas Nakertrans		
		5	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	4 Orang	Dinas Nakertrans		
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten/kota	3 Unit	Dinas Nakertrans		
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota	6 Kerjasama	Dinas Nakertrans		
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	254 Orang	Dinas Nakertrans		
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0%	Dinas Nakertrans		
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0 Orang	Dinas Nakertrans		
		11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulungan	0%	Dinas Nakertrans		
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0%	Dinas Nakertrans		
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0%	Dinas Nakertrans		
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0 LTSA	Dinas Nakertrans		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD					
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	54 Lembaga	DP3A		
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	2 Program	DP3A		
		2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota					
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Tidak Ada	DP3A		
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2 Lembaga	DP3A		



		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 %	DP3A		
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	1 Lembaga	DP3A		
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)	Tidak Ada	DP3A		
		3 Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)					
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Tidak Ada	DP3A		
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	2 Orang	DP3A		
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pelatihan	7 Lembaga	DP3A		
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2 Lembaga	DP3A		
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 Program	DP3A		
		6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	3 Lembaga	DP3A		
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	DP3A		
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)					
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Dinas Ketapang		
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ya	Dinas Ketapang		
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ya	Dinas Ketapang		
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ya	Dinas Ketapang		
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Ketapang		



		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ya	Dinas Ketapang		
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada	Dinas Ketapang		
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ya	Dinas Ketapang		
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					
		1	SK Izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota		Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
		2	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Objek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subjek		Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
		3	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee		Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
		4	Dokumen izin membuka tanah		Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
		5	Dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota		Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum					
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal					
		Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee					
		Tersedianya tanah untuk masyarakat					
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi					
11	Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota					
		1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks kualitas udara (IKU) c. Indeks kualitas lahan (IKL) d. Indeks tutupan hutan (ITH)		57.14 83.23 44.97 0	DLH	



		2 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota			
	1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada	DLH	
			Ada		
			Tidak Ada		
		3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota			
	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	DLH	
	2	Rasio pejabat pengawas LH (PPLHD) di kabupaten/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0.33%	DLH	
	3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	0%	DLH	
	4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0%	DLH	
	5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0%	DLH	
	6	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	DLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik			
	1	Penerbitan akta perkawinan	100%	Dinas Dukcapil	
	2	Penerbitan akta perceraian	100%	Dinas Dukcapil	
	3	Penerbitan akta kematian	100%	Dinas Dukcapil	
	4	Penyajian data kependudukan	100%	Dinas Dukcapil	
		Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA			
		Kepemilikan akta kelahiran			
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama			



13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.Persentase pengentasan desa tertinggal						
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Tidak Ada	Dinas PMPD			
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Tidak Ada	Dinas PMPD			
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Tidak Ada	Dinas PMPD			
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Tidak Ada	Dinas PMPD			
		2.Persentase peningkatan status desa mandiri						
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	121 Desa	Dinas PMPD			
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0 Desa	Dinas PMPD			
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	7.058 Lembaga	Dinas PMPD			
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Tidak Ada	Dinas PMPD			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.TFR (Total Fertility Rate)/Angka Kelahiran Total						
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Dinas PP&KB			
		2	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,4	Dinas PP&KB			
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30,10	Dinas PP&KB			
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	88,74 %	Dinas PP&KB			
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	30 Jenis	Dinas PP&KB			
				2.Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				
				1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	37 %	Dinas PP&KB	
				2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19,80 %	Dinas	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

					PP&KB		
		3	Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Tidak Ada Data	Dinas PP&KB		
		4	Persentase pelayanan KB pasca melahirkan	77,02 %	Dinas PP&KB		
		3.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)					
		1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	9,50 %	Dinas PP&KB		
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	41,43%	Dinas PP&KB		
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kot					
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100 %	Dinas Perhubungan		
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	100 %	Dinas Perhubungan		
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Tidak Ada	Dinas Perhubungan		
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	53,13 %	Dinas Perhubungan		
		V/C Ratio di jalan kabupaten/kota					
		1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	53,13 %	Dinas Perhubungan		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	88,89 %	Dinas Kominfo SP		
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	28,70 %	Dinas Kominfo SP		
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Tidak Tersedia	Dinas Kominfo SP		
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					
1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang	42,86%	Dinas				



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015		Kominfo SP		
	2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal atau situs web yang sesuai standar	12,17%	Dinas Kominfo SP		
	3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	44,44%	Dinas Kominfo SP		
	4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100%	Dinas Kominfo SP		
	5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang memanfaatkan sertifikat elektronik	12,50%	Dinas Kominfo SP		
	6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	62,50%	Dinas Kominfo SP		
	7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	62,50%	Dinas Kominfo SP		
	8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	0%	Dinas Kominfo SP		
	9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	0%	Dinas Kominfo SP		
	10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo)	0%	Dinas Kominfo SP		
	11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	13,33%	Dinas Kominfo SP		
	12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	4,44%	Dinas Kominfo SP		
	13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	62,50%	Dinas Kominfo SP		
	14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	Dinas Kominfo SP		
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota			
	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	100 %	Dinas Kominfo SP		
	2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100 %	Dinas Kominfo SP		
3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100 %	Dinas Kominfo SP			



17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
Meningkatnya koperasi yang berkualitas				
1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,11%	Dinas Kop&UKM	
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	50%	Dinas Kop&UKM	
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	14,19%	Dinas Kop&UKM	
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	56,76%	Dinas Kop&UKM	
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	52,70%	Dinas Kop&UKM	
6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,12%	Dinas Kop&UKM	
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,68%	Dinas Kop&UKM	
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Tidak Ada	Dinas Kop&UKM	
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,81%	Dinas Kop&UKM	
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas Kop&UKM	
11	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas Kop&UKM	
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Kop&UKM	
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Kop&UKM	
Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha				
1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	7,88%	Dinas Kop&UKM	
2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (OSD)	3,49%	Dinas	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

					Kop&UKM		
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,19%	Dinas Kop&UKM		
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,08%	Dinas Kop&UKM		
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,11%	Dinas Kop&UKM		
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,37%	Dinas Kop&UKM		
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0,28%	Dinas Kop&UKM		
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota					
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Tidak Ada	DPM-PTSP		
		2	Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak Ada	DPM-PTSP		
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak Ada	DPM-PTSP		
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1 Kegiatan	DPM-PTSP		
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	1 Kegiatan	DPM-PTSP		
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak Ada	DPM-PTSP		
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Ada	DPM-PTSP		
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3.437 Izin	DPM-PTSP		
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Rp 8.115.494.696.193	DPM-PTSP		
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	247 Pelaku Usaha	DPM-PTSP		
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	204 Pelaku Usaha	DPM-PTSP		
12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota	Ada	DPM-PTSP				



19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri					
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	100 Orang	Dispora		
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tidak Ada	Dispora		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan					
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	452 Orang	Dispora		
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	255 Orang	Dispora		
		Peningkatan Prestasi Olahraga					
		1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan - satuan pendidikan	48 Orang	Dispora		
2	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	1 Kali	Dispora				
20	Statistik	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
		1	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Dinas Kominfo SP		
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 Kegiatan	Dinas Kominfo SP		
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 Dokumen	Dinas Kominfo SP		
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1 Dokumen	Dinas Kominfo SP		
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1 Dokumen	Dinas Kominfo SP		
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100%	Dinas Kominfo SP		
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100%	Dinas Kominfo SP		



		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah				
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0 Kegiatan	Dinas Kominfo SP	
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip - prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	66,67%	Dinas Kominfo SP	
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	33,33 %	Dinas Kominfo SP	
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0 Kegiatan	Dinas Kominfo SP	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya				
		1	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	10 Objek	Dinas Parbud	
		2	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	1 Objek	Dinas Parbud	
		3	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	5 Objek	Dinas Parbud	
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	3 Orang	Dinas Parbud	
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	9 Objek	Dinas Parbud	
		6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	3 Objek	Dinas Parbud	
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Tidak Ada Data	Dinas Parbud	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Tidak Ada Data	Dinas Parbud		
		9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)	3 Objek	Dinas Parbud		
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	465 Item	Dinas Parbud		
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	43.285 Kunjungan	Dinas Parbud		
			Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	32 Orang	Dinas Parbud		
		12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak perlu diisi	Dinas Parbud		
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1 Tim TACB	Dinas Parbud		
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	1 Tim	Dinas Parbud		
		15	Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya	5 Orang	Dinas Parbud		
		16	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	32 Orang	Dinas Parbud		
		17	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	32 Orang	Dinas Parbud		
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	196 Unit	Dinas Parbud		
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	4 Kegiatan	Dinas Parbud		
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat					
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	20,53 %	Dinas Perpus&Arsip		
		2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	116,44 %	Dinas Perpus&Arsip		
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,000075	Dinas Perpus&Arsip		
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,18%	Dinas Perpus&Arsip		



	5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	20 Lokus	Dinas Perpus&Arsip	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak Ada	Dinas Perpus&Arsip	
	2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak Ada	Dinas Perpus&Arsip	
	3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak Ada	Dinas Perpus&Arsip	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpus&Arsip	
	2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpus&Arsip	
	3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0%	Dinas Perpus&Arsip	
	4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0%	Dinas Perpus&Arsip	
	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Ada SOP	Dinas Perpus&Arsip	
	2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai dengan NSPK	Perka ANRI (Norma)	Dinas Perpus&Arsip	
	3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai dengan NSPK di provinsi	Perka ANRI (Norma)	Dinas Perpus&Arsip	
	4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	Perka ANRI (Norma)	Dinas Perpus&Arsip	
	5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Perka ANRI (Norma)	Dinas Perpus&Arsip	
	6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan NSPK	Perka ANRI (Norma)	Dinas Perpus&Arsip	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.	
1	2	3	4	5	6	
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data : one data KKP)				
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	900 RTP	Dinas Perikanan	
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%	Dinas Perikanan	
		3	Jumlah izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	23 IUP	Dinas Perikanan	
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	182 RTP	Dinas Perikanan	
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	602.500 Ekor	Dinas Perikanan	
2	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	135 Objek Wisata	Dinas Parbud	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	4 Jenis	Dinas Parbud	
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	97 Usaha	Dinas Parbud	
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	790 Orang	Dinas Parbud	
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	7 Event	Dinas Parbud	
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Parbud	
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Tidak Ada	Dinas Parbud	
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	2.701 Orang	Dinas Parbud	
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	22,2 %	Dinas Parbud	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	23 Desa	Dinas Parbud	
			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota			
			Tingkat hunian akomodasi			
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku			
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD			
3	Pertanian		Produktivitas pertanian per hektar per tahun			
		1	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	13 Jenis 12 Unit	Dinas TPH	
		2	Prasarana pertanian yang digunakan	12 Unit	Dinas TPH	
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	Tidak Ada	Dinas TPH	
		4	Persentase prasarana yang digunakan	100%	Dinas TPH	
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas TPH	
			Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular			
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	54,83 %	Dinas Nakbun	
4	Kehutanan					
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan TAHURA	Tidak perlu diisi	BUP	
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Tidak perlu diisi	BUP	
		3	Pemulihan ekosistem pada TAHURA	Tidak perlu diisi	BUP	
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Tidak perlu diisi	BUP	



5	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kabupaten/kota					
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota		Tidak perlu diisi	BUP	
6	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTMT/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan		Tidak Ada 100 %	Dinas Perdastris	
		2	Persentase penerbitan TDG		76,32 %	Dinas Perdastris	
		3	Persentase gudang yang tidak memiliki TDG		76,32 %	Dinas Perdastris	
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		100% Tidak Ada Data Tidak Ada Data	Dinas Perdastris	
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota		Tidak Ada	Dinas Perdastris	
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu		Tidak Ada	Dinas Perdastris	
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		49 %	Dinas Perdastris	
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		3.76	Dinas Perdastris	
		Persentase kinerja realisasi pupuk					
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		0,0000018 %	Dinas Perdastris	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku					
		1	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		99,77 %	Dinas Perdastris	
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		Tidak Ada	Dinas Perdastris	



7 Perindustrian							
7	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota					
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IKUI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Perdastris		
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK					
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100 %	Dinas Perdastris		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin yang diterbitkan izin usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100 %	Dinas Perdastris		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	Tidak Ada	Dinas Perdastris		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota					
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini					
1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota	100 %	Dinas Perdastris				
8 Transmigrasi							
8	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	2 Unit	Dinas Nakertrans		
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	2 Unit	Dinas Nakertrans		
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	2 Unit	Dinas Nakertrans		



2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

Adapun capaian indikator kinerja kunci hasil dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kunci Hasil Tahun 2023

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
URUSAN WAJIB							
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten Gowa}} \times 100\%$	$\frac{25.274}{29.039} \times 100\%$	87,03 %	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 thn yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 thn pada Kabupaten Gowa}} \times 100\%$	$\frac{88.876}{88.341} \times 100\%$	100,61 %	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 thn yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 thn pada Kabupaten Gowa}} \times 100\%$	$\frac{43.797}{44.550} \times 100\%$	98,31 %	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten Gowa}} \times 100\%$	$\frac{5.652}{4.493} \times 100\%$	114,34 %	
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah penduduk di Kabupaten Gowa}} \times 100\%$	$\frac{535}{799.999} \times 100\%$	0,07 %	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Gowa yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten Gowa}} \times 100\%$	$\frac{3}{4} \times 100\%$	75 %	
		3	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten Gowa}} \times 100\%$	$\frac{13.117}{12.945} \times 100\%$	101,33 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	4	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100% Jumlah ibu bersalin di Kabupaten Gowa	12.003 ----- x 100% 12.315	97,47 %	
	5	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten Gowa	11.871 ----- x 100% 11.687	101,57 %	
	6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah balita di Kabupaten Gowa	48.976 ----- x 100% 51.509	95,08 %	
	7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Gowa	81.841 ----- x 100% 79.961	102,35 %	
	8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten Gowa	337.514 ----- x 100% 343.080	98,38 %	
	9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten Gowa	69.082 ----- x 100% 67.010	103,09 %	
	10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Gowa	86.844 ----- x 100% 89.384	97,16 %	
	11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita DM di Kabupaten Gowa	8.106 ----- x 100% 8.333	97,28 %	
	12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten Gowa	1.533 ----- x 100% 1.596	96,05 %	
	13	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita TBC di Kabupaten Gowa	30.084 ----- x 100% 28.717	104,76 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten Gowa	13.018 ----- x 100% 14.257	91,31 %	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	0 -- x 100% 0	0 %	
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) ----- x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai Rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)	0 -- x 100% 0	0 %	
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100% Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	2.104 ----- x 100% 27.806	7,57 %	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten ----- x 100% Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten t	166.952 ----- x 100% 179.171	93,18 %	
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk +jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di kabupaten/kota	172.326 ----- x 100% 179.171	96,18 %	
		6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ----- x 100% Jumlah IMB yang berlaku	152 --- x 100% 152	100%	
		7	Tingkat kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap ----- x 100% Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	1.410,18 ----- x 100% 2.184,40	64,65 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ----- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten	30 ---- x 100% 30	100 %	
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi ----- x 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	104 ---- x 100% 104	100 %	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ----- x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	75 ---- x 100% 14	535,71 %	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100% Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	5 --- x 100% 5	100 %	
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	396,04 ----- x 100% 707,22	56,00 %	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh ----- x 100% Jumlah total unit rumah kabupaten	38.750 ----- x 100% 144.977	26,73 %	
		5	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100% Jumlah unit rumah kabupaten	3.695 ----- x 100% 144.977	2,55 %	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	113 ---- x 100% 113	100 %	
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	14 ---- x 100% 14	100 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ----- x 100% Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	748.900 ----- x 100% 794.431	94,27 %	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	736.955 ----- x 100% 794.431	92,77 %	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana ----- x 100% Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	7.132 ----- x 100% 7.132	100 %	
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemdams Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten	96 --- x 100% 96	100 %	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	19,43 Menit	19,43 Menit	
6	Sosial	1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	344 ----- x 100% 344	100 %	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	705 ----- x 100% 705	100 %	
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten	4 --- x 100% 4	100 %	
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	75 ----- x 100% 141.227	0.10 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	15.734,85 ----- x 100% 141.227,00	9,97 %	
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah perusahaan	108 ----- x 100% 108	100 %	
		5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencari kerja yang terdaftar	254 ----- x 100% 1.578	16,10 %	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- x 100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD	Rp. 538.800.000,00 ----- x 100% Rp.2.269.465.295,00	23,74 %	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi ----- x 100% Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	67 ----- x 100% 207.387	0,03 %	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100% Jumlah penduduk perempuan	29 ----- x 100% 403.869	0,01 %	
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan ----- x 100% Jumlah kebutuhan pangan	33,01 ----- x 100% 86.840	0,03 %	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi ----- x 100% Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi ----- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	
		4	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Tanah Objek Landreform (TOL) ----- x 100% Jumlah penerima tanah objek landreform	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa	65.04	65.04	
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	Total volume sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Total volume timbunan sampah kabupaten	116.800,00 ----- x 100% 145.999,82	80,00 %	
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	2 --- x 100% 23	8,70 %	
12	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100% Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas	572.881 ----- x 100% 580.722	98,65 %	
		2	Persentase anak usia 0 -17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA ----- x 1000 Jumlah anak usia 0 - 17 tahun	91.104 ----- x 100% 227.168	40,10 %	
		3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akte lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0 -18 tahun	232.783 ----- x 100% 234.058	99,46 %	
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan Berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100% Jumlah OPD	14 ---- x 100% 54	25,92 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	$\frac{0}{1} \times 100\%$	100 %	
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	$\frac{54}{10} \times 100\%$	540 %	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,2	2,2	
		2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{86.766}{121.222} \times 100\%$	71,58 %	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{11516}{121.222} \times 100\%$	9,50 %	
15	Perhubungan	1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota		Rasio Konektivitas Kabupaten Gowa : RK = (IK1 x Bobot Angkutan Jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan SDP) = ((3 x 1)/9) x 100 + 0 = 0.33	0.33	
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		V/C Ratio untuk Jalan Kabupaten Gowa : 0.25 (Tingkat Pelayanan B)	0.25 (Tingkat Pelayanan B)	
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah PD	$\frac{56}{63} \times 100\%$	88,89 %	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah layanan publik	$\frac{5}{8} \times 100\%$	62,50 %	
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten ----- x 100% Jumlah penduduk	$\frac{593.787}{783.167} \times 100\%$	75,82 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	48 ----- x 100% 148	32,43 %	
		2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	10.860 ----- x 100% 54.002	20,11 %	
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten ----- x 100% Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten	Tahun 2023 : 8.134.317.355.130 Tahun 2022 : <u>5.420.778.835.062</u> - 2.713.538.520.098 2.713.538.520.098 ----- x 100% 5.420.778.835.062	50,06 %	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	4.169 ----- x 100% 184.849	2.26 %	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	1.488 ----- x 100% 184.849	0.80 %	
		3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Porprov : 3 Emas, 5 Perak, 5 Perunggu	3 Emas, 5 Perak, 5 Perunggu	
20	Statistik	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah PD	22 --- x 100% 54	100 %	
		2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah PD	24 --- x 100% 54	100 %	
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	1,18 ----- x 100% 5	23,60%	
22	Kebudayaan	1	Terlestariannya Cagar Budaya	Jumlah 10221	9 ---- x 100% 52	17.31 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		55,27	55,27	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		65,12	65,12	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan 59 UU 43/2009)	$T = (a + l + s + j) / 4$	$T = (100+100+0+0) / 4$ $T = 200/4$ $T = 50$	50	
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + j) / 6$	Tidak Ada	Tidak Ada	
URUSAN PILIHAN							
1	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten	$\frac{\text{Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten}}{\text{Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan}} \times 100\%$	$\frac{2.475,0 \text{ ton}}{2.475,0 \text{ ton}} \times 100\%$	100 %	
2	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	$\frac{790 - 254}{254} \times 100\%$	211,02 %	
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	$\frac{845.282 - 754.767}{754.767} \times 100\%$	11,99 %	
		3	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	$\frac{16.414}{242.278} \times 100\%$	6,77 %	
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah total PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 749.169.000}}{\text{Rp.28.453.306.000}} \times 100\%$	2,63 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah total PAD	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ----- x 100% Jumlah total PAD	Rp. 749.169.000 ----- x 100% Rp.276.496.451.245	0,27 %	
3	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ----- Luas panen	1.032.894,89 ----- 132.800,11	7,77 ton/ha	
		2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ----- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit menular tahun sebelumnya	1.902 - 2.141 ----- x 100% 2.141	11,16 %	
4	Kehutanan						
5	Energi Sumber Daya Mineral						
6	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten	12.783 ----- x 100% 12.830	99,63 %	
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi ----- x 100% Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	51.798.045 ----- x 100% 57.075.000	90,75 %	
		3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di	4.448 ----- x 100% 4.716	94,32 %	
7	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 wilayah kabupaten	1.290-1.261 ----- x 100% 1.261	2,30 %	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		5 Sasaran	Tidak Ada	
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	1.290 ----- x 100% 1.290	100 %	



		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	Tidak Ada Data	0 %	
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada/Tidak	Ada	Ada	
8	Transmigrasi	-	-	-	-	-	

2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Adapun capaian indikator kinerja kunci hasil untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Kunci Hasil Tahun 2023

NO	FUNGSI PENUNJANG	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 195.917.059.731,00}}{\text{Rp.1.996.144.644.316,77}} \times 100\%$	9,81 %	
		2	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 323.069.408.079,66}}{\text{Rp.1.900.334.191.893,62}} \times 100\%$	17,00 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3	
	4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3	
	5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	Rp.1.562.497.453.655,83 Rp. 300.208.422.185,00 (-) = Rp.1.262.289.031.470,83 Total Belanja APBD = Rp.1.996.144.644.316,77 $\frac{\text{Rp.1.262.289.031.470,83}}{\text{Rp.1.996.144.644.316,77}} \times 100\%$	63,24 %	
	6	Opini Laporan Keuangan	Opini 10 tahun terakhir	2012 - 2019 : WTP 2020 : WDP 2021 - 2022 : WTP	9 WTP 1 WDP (2020)	
Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	$\frac{0}{257} \times 100\%$	0 %	
	2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$	$\frac{3.719}{1.951} \times 100\%$	190,62 %	
	3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja operasi dan modal}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp.84.141.201.292.826}}{\text{Rp.90.076.697.401.900}} \times 100\%$	93,41 %	
IKK Baru	4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah	$\frac{\text{(Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2023 - Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2022)}}{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2022}} \times 100\%$	Rp. 453.544.703.450,67 Rp. 480.949.979.456,79 (-) = - Rp. 27.405.276.006,12 $\frac{-\text{Rp. 27.405.276.006,12}}{\text{Rp. 480.949.979.456,79}} \times 100\%$	-5,69 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepegawaian	1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai	1.823 ----- x 100% 7.074	25,77 %	
	2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga Kesehatan) ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	345 ----- x 100% 2.266	15,23 %	
	3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	103 ----- x 100% 345	29,86 %	
Manajemen Keuangan	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja Nilai absolut dari (----- dikurangi satu) x 100% Total belanja APBD	Rp. 1.996.144.644.316,77 ----- x 100% Rp. 2.170.826.662.074,00	91,95 %	
	2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi ----- x 100% Total PAD dalam APBD dikurangi satu	Rp. 323.069.408.079,66 ----- x 100% Rp. 319.592.466.639,00	101,09 %	
	3	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ya	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ya	
	4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA ----- x 100% Total belanja anggaran tahun sebelumnya	Rp. 179.132.914.968,62 ----- x 100% Rp. 2.141.847.697.845,00	8,36 %	
Transparansi dan Partisipasi Publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- x 100% Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Rp. 12.971.555.685 ----- x 100% Rp. 13.098.011.729	99,03 %	
	2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- x 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci	8 -- x 100% 8	100 %	



2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Sesuai Inpres nomor 7 tahun 1999 bahwa Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gowa tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

2.3.1 Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Gowa selaku pengemban amanah masyarakat Gowa melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gowa yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk



menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gowa .

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Gowa .

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Section 1.01 Tabel 2.5 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah**

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 75 %	Kurang Berhasil

Secara umum Pemerintah Kabupaten Gowa telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021, namun demikian karena pada tahun 2021 merupakan masa transisi/pergantian



pemegang kekuasaan dari Bupati sebelumnya kepada Bupati terpilih untuk periode Tahun 2021 - 2026, Ukuran keberhasilan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah utamanya mengacu pada RPJMD periode Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

Section 1.02 Tabel 2.6
Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif	1. Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif (1)		Indeks Pembangunan Manusia
		1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat (1)	Indeks Pendidikan
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
		3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (3)	Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Pemuda
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi	2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah (2)		Pertumbuhan Ekonomi PDRB Per Kapita
		1. Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah (4)	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan)
		2. Meningkatnya kesempatan kerja (5)	Tingkat Pengangguran Terbuka
		3. Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu (6)	Angka Kemiskinan
		4. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat (7)	Gini Rasio
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan	4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur		Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB



berwawasan lingkungan	layanan dasar masyarakat (3)		
		1. Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi (8)	Indeks Infrastruktur Daerah
		2. Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan (9)	Indeks Desa Membangun
		3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (10)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien (4)		Indeks Reformasi Birokrasi
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (11)	Indeks Pelayanan Publik
		2. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (12)	Nilai LPPD Nilai SAKIP Nilai IPKD

2.3.2. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA SASARAN

Informasi analisis dan evaluasi capaian kinerja disajikan menggunakan 7 alat analisis pendekatan yaitu (1) perbandingan antara target dan realisasi kinerja (2) perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, (3) perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (4) perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan (6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan (7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan uraian sebagai berikut :

2.3.2. 1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI



Pengukuran capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Gowa tahun 2023 berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pengukuran Capaian Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target PK 2023	Realisasi 2023	Capaian
Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif (1)		Indeks Pembangunan Manusia		73,01	
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat (1)	Indeks Pendidikan	66,5	66,12	99,43
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (2)	Indeks Kesehatan	78,22	78,29	100,09
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (3)	Indeks Pemberdayaan Gender	87,83	87,37	99,48
		Indeks Pembangunan Pemuda	43,5	43,28	99,49
Rata-Rata Capaian Sasaran 3					99,67
Rata-Rata Capaian Tujuan 1					99,74
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah (2)		Pertumbuhan Ekonomi		5,82	
		PDRB Per Kapita		35,52 Juta	
	Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah (4)	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan)	7,00	9,51	135,86
	Meningkatnya kesempatan kerja (5)	Tingkat Pengangguran Terbuka	5	3,43	131,40
	Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu (6)	Angka Kemiskinan	6	7,12	81,33
	Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat (7)	Gini Ratio	0,3	0,32	93,33
Rata-Rata Capaian Tujuan 2					110,48
4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat (3)		Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB		6,69	
	Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi (8)	Indeks Infrastruktur Daerah	58	56	96,55
	Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan (9)	Indeks Desa Membangun	0,780	0,786	100,77
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (10)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70-80 (Baik)	65,04	92,91
Rata-Rata Capaian Tujuan 3					96,83
Mewujudkan tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi		67,31 (B)	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target PK 2023	Realisasi 2023	Capaian
bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien (4)		Birokrasi			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (11)	Indeks Pelayanan Publik	4,01-4,50 (A-)	3,32	82,79
	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (12)	Nilai LPPD	3.86 (Tinggi)	3.86 (Tinggi)	100,00
		Nilai SAKIP	70-80 (BB)	68,55	97,93
		Nilai IPKD	60-80	65,2	100,00
Rata-Rata Capaian Sasaran 12					99,31
Rata-Rata Capaian Tujuan 4					95,18
Total Rata-Rata Capaian Sasaran					100,55

Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Gowa sebagian besar sudah mencapai target yang telah ditetapkan dan ada yang melebihi target, secara rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Kabupaten Gowa tahun 2023 sudah berada pada kategori **Sangat Berhasil** dengan Capaian sebesar **100,55 persen**.

Terdapat 12 sasaran strategis yang diukur dijabarkan dalam 15 indikator kinerja diperoleh hasil sebanyak 4 sasaran strategis yang berada pada kategori sangat berhasil (capaian diatas 100 %), 6 sasaran strategis berada pada kategori Berhasil (Capaian 90%-100%) dan 2 sasaran berada pada kategori cukup Berhasil (Capaian 75% - 90 %) dengan uraian sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis pada Kategori Sangat Berhasil

- a. Sasaran meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah dengan indikator Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan) dengan capaian sebesar **135,86 persen**. Tingginya capaian sasaran ini tidak terlepas dari besarnya kontribusi sektor unggulan kabupaten Gowa terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gowa yang ditargetkan **7 persen** dan terealisasi sebesar **9 persen**. Capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi pertumbuhan dari 3 lapangan usaha masing-masing Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar **3,34 persen** dan lapangan usaha industri



pengolahan tumbuh sebesar **12,35 persen**. Penetapan target dalam Perjanjian Kinerja 2023 sebesar **7 persen** telah mempertimbangkan target yang *achievable* dan menantang dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dimana pertumbuhan ekonomi kabupaten Gowa pernah berada kondisi yang sangat ideal sekitar **7 persen** dan sangat memungkinkan sektor unggulan Kabupaten Gowa bisa mengikuti realisasi tersebut.

- b. Sasaran meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dengan capaian **131,40 persen** dengan target perjanjian kinerja 2023 sebesar 5 persen dan terealisasi sebesar 3,43 persen. Penetapan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2022 cukup rasional karena telah melalui analisis mendalam dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka pada saat ditetapkan, antara lain: (1) Pertumbuhan Ekonomi dimana tingkat pengangguran terbuka cenderung tinggi ketika ekonomi daerah sedang mengalami kontraksi, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa tahun 2022 mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar dari **7,26 ditahun 2021** menjadi **4,56 di tahun 2022** sehingga diprediksi akan berlanjut di tahun 2023. (2) Struktur ekonomi suatu daerah juga mempengaruhi tingkat pengangguran. Daerah yang memiliki sektor industri dan jasa yang berkembang biasanya memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah karena ada lebih banyak peluang kerja, kondisi tahun struktur ekonomi Gowa tahun 2022 didominasi oleh lapangan usaha non sektor industri dan jasa seperti lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar **28,47 persen**, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar **12,79 persen** dan lapangan usaha lapangan usaha konstruksi sebesar **11,37 persen** dan (3) Angka Migrasi penduduk Kabupaten Gowa dari daerah lain karena kondisi Kabupaten Gowa sebagai daerah penyanggah Kota



Makassar dimana Kabupaten Gowa merupakan daerah pengembangan pemukiman diprediksi mempengaruhi tingkat pengangguran, Jika ada banyak tenaga kerja yang bermigrasi ke Kabupaten Gowa dan pasokan pekerjaan tidak cukup, maka tingkat pengangguran dapat meningkat.

- c. Sasaran berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan dengan indikator Indeks Desa membangun dengan capaian **100,77 persen** terealisasi sebesar 0,786 melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,780. Indeks Desa Membangun digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu desa yang biasanya dihitung berdasarkan beberapa variabel atau faktor yang mencerminkan aspek-aspek pembangunan di desa tersebut. Penetapan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2023 telah mempertimbangkan aspek ketersediaan sumber daya yang tersedia dan realistis untuk dapat dicapai yaitu dengan mempertimbangkan aspek yang mempengaruhi indeks IDM yang sangat dipengaruhi oleh kondisi jumlah Desa dalam kategori mandiri di Kabupaten Gowa yang jumlahnya terus mengalami peningkatan.
- d. Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan dengan capaian **100,09 persen** dengan target pada perjanjian kinerja sebesar 78,22 dan terealisasi sebesar 78,29. Indeks Kesehatan merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang perhitungannya menggunakan data umur harapan hidup. Capaian sasaran ini yang melebihi **100 persen** karena penetapan target dalam Perjanjian kinerja telah mempertimbangkan perkembangan umur harapan hidup masyarakat kabupaten Gowa yang mengalami peningkatan hingga mencapai angka 70,70 di tahun 2022 dan realisasi yang dicapai di tahun 2023 sebesar 70,82 tahun merupakan capaian yang terukur yang mempengaruhi peningkatan nilai indeks kesehatan.



2. Sasaran Strategis pada Kategori Berhasil

- a. Sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan yang merupakan komposit dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diperoleh capaian sebesar 99,43 persen dengan realisasi sebesar 66,12 masih berada dibawah dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023 sebesar 66,50 walaupun masih dalam kategori berhasil. Faktor penyebab realisasi kinerja berada dibawah target yang ditetapkan karena pertumbuhan harapan lama sekolah hanya mampu tumbuh 0,29 persen ditahun 2023 yaitu sebesar 13,66 tahun di tahun 2022 menjadi 13,70 tahun pada tahun 2023 merupakan angka pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan rata-rata lama sekolah kabupaten Gowa peningkatannya lebih baik yaitu tumbuh sebesar 0,12 persen dari 8,40 tahun ditahun 2022 menjadi 8,41 tahun di tahun 2023.
- b. Sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Pemuda dengan capaian 99,48 persen dalam kategori berhasil. Faktor yang mempengaruhi realisasi kinerja masih dibawah target yang ditetapkan karena capaian Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Pemuda yang sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya sehingga diperlukan fleksibilitas dalam menyesuaikan target menghadapi perubahan lingkungan sehingga diperlukan evaluasi dalam penetapan target berikutnya.
- c. Sasaran menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat dengan indikator indeks gini ratio dengan capaian 93,33 persen dimana realisasi masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan walaupun masih dalam kategori berhasil. Pertumbuhan indeks gini ratio kabupaten Gowa di tahun 2023 cenderung lebih tinggi dari pola tahun sebelumnya karena dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan antara individu atau kelompok dengan indikasi persentase



penduduk miskin kabupaten Gowa yang cenderung meningkat dan kondisi Geografis Wilayah kabupaten Gowa yang terdiri dari 60 persen di daerah pegunungan dataran tinggi menyebabkan akses terhadap sumber daya ekonomi yang sedikit mengalami hambatan.

- d. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup dengan capaian sebesar **92,91 persen** dengan realisasi kinerja sebesar 65,04 masih berada dibawah target yang telah ditetapkan 70-80 (Baik) walaupun masih dalam kondisi kinerja yang **Berhasil**. Faktor yang mempengaruhi Indeks kualitas lingkungan adalah indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan realisasi pengukuran yang dilakukan indeks kualitas air dan indeks kualitas lahan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sedangkan indeks kualitas air turun dari 86,80 persen di tahun 2022 turun menjadi 82,23 di tahun 2023.
- e. Sasaran Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikembangkan dengan 3 indikator yaitu nilai LPPD, nilai SAKIP dan nilai IPKD dengan capaian 95,18 persen dalam kategori berhasil. Faktor penyebab capaian masih dibawah target disebabkan indikator nilai SAKIP yang realisasinya masih berada lebih kecil target yang ditetapkan BB meskipun terjadi peningkatan nilai SAKIP yang cukup signifikan namun belum mampu berpindah ke kategori yang lebih baik sesuai yang ditargetkan yaitu BB.
- f. Sasaran terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi dengan indikator indeks infrastruktur daerah dengan capaian sebesar **96,55 persen** dengan realisasi kinerja sebesar 56 persen masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 58 persen. Penetapan target kinerja tahun 2023 sebenarnya telah mempertimbangkan aspek terjangkau untuk dicapai dengan sumber daya yang tersedia mengingat capaian kinerja ini telah dicapai di tahun sebelumnya namun realisasinya terjadi penurunan dari



tahun sebelumnya.

3. Sasaran Strategis pada Kategori Cukup Berhasil

Terdapat 2 sasaran berada pada kategori cukup Berhasil (Capaian 75% - 90 %) sebagai berikut :

- a. Sasaran berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu dengan indikator angka kemiskinan dengan realisasi sebesar 7,12 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 6 persen dengan capaian **81,33 persen** dalam kategori cukup berhasil. Penetapan target angka kemiskinan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 telah mempertimbangkan aspek keterjangkauan untuk dicapai dan menantang serta telah mempertimbangkan capaian tahun-tahun sebelumnya dimana di tahun 2022 angka kemiskinan kabupaten Gowa turun 7,36 persen dari tahun 2021 sebesar 7,36 dengan memperhatikan faktor koreksi dalam target kinerja RPJMD dalam tahun berkenaan. Realisasi target kinerja yang cenderung meningkat dipengaruhi oleh faktor pembentuk angka kemiskinan yaitu Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, dimana kedua nilai tersebut semakin menurun di tahun 2023.
- b. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks pelayanan publik dimana realisasi kinerja sebesar 3,32 masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 4,01-4,50 (A-) dengan capaian 82,79 persen dalam kategori cukup berhasil. Penetapan target dalam perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 4,01-4,50 (kategori A-) terbilang rasional mengingat capaian indeks pelayanan publik di tahun 2021 dan tahun 2022 telah mencapai nilai 4,02 (kategori A-) dan 4,00 (kategori A-). Rendahnya



persentase capaian lebih disebabkan karena pada penilaian IPP tahun 2023 ada perubahan dalam penentuan sampel untuk pelayanan administrasi mengambil sampel Kecamatan dimana tahun sebelumnya menggunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kontribusi nilai IPP sampel kecamatan Kabupaten Gowa memberikan kontribusi yang rendah dengan nilai 2,73 dengan sebagian besar mendapatkan catatan rekomendasi perlu ditingkatkan dan perlu pembinaan.

2.3.2.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja Kabupaten Gowa tidak hanya pada tahun yang berkenaan tetapi juga dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Hal ini diperlukan untuk melihat trend capaian dari tahun ke tahun semakin membaik atau justru sebaliknya. Berikut merupakan tabel perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022

MISI	SASARAN	INDIKATOR	Data Awal 2021	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja			
				2022	2023	2020	2022	2023	2020	
I	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif									
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat (1)	Indeks Pendidikan	65,25	65,94	66,12	200,22	200,22	100,36	99,43	200,22
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (2)	Indeks Kesehatan	77,62	78	78,29	200,22	200,22	100,12	100,09	200,22
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (3)	Indeks Pemberdayaan Gender	78,94	87,83	87,37	200,22	200,22	110,82	99,48	200,22
		Indeks Pembangunan Pemuda	42	43,32	43,28	200,22	200,22	101,92	99,49	200,22
II	Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi									



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

MISI	SASARAN	INDIKATOR	Data Awal 2021	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja						
				2022	2023	2024	2022	2023	2024				
	Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah (4)	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan)	7,32	7,85	9,51				97,32	135,86			
	Meningkatnya kesempatan kerja (5)	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,3	3,26	3,43				137,9	131,40			
	Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu (6)	Angka Kemiskinan	7,54	7,36	7,12				96,04	81,33			
	Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat (7)	Gini Ratio	0,358	0,36	0,32				88,68	93,33			
III	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan												
	Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi (8)	Indeks Infrastruktur Daerah	50	58	55				101,24	100,00			
	Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan (9)	Indeks Desa Membangun	0,724	0,761	0,78				111,14	100,00			
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (10)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,99	64,51	65,04				100	92,91			
IV	Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas												
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (11)	Indeks Pelayanan Publik	4,02	4	3,32				99,75	82,79			
	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (12)	Nilai LPPD	3,66 (Tinggi)	65	3,86 (Tinggi)				100	100,00			
		Nilai SAKIP	65,38 (B)	66,67	68,55				100	97,93			
		Nilai IPKD	60-80	65	65,2				100	100,00			

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa trend persentase capaian realisasi kinerja indikator utama Kabupaten Gowa tahun 2021 - 2026 secara umum fluktuatif. Terdapat 11 dari 15 indikator kinerja yang konsisten mengalami trend positif realisasi kinerjanya dari tahun 2021 - 2026 yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Pembangunan Pemuda, Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan), Angka Kemiskinan, Gini Ratio, Indeks Desa Membangun, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Nilai SAKIP



dan Nilai IPKD. Hanya 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja stagnan dari tahun 2022 - 2023 yaitu Nilai LPPD sedangkan indikator kinerja dengan capaian kinerja negatif dari tahun 2022 - 2023. Sementara itu masih terdapat 4 indikator kinerja dengan capaian kinerja menurun dari tahun 2022 ke 2023 yaitu tingkat Pengangguran terbuka, Indeks Infrastruktur Daerah Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pelayanan Publik.

2.3.2.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Realisasi kinerja indikator kinerja utama Kabupaten Gowa tahun 2023 juga perlu diperbandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Hal ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana kinerja yang sudah dilakukan mampu mencapai target menengah yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2026 :

Tabel 2.9
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD

MISI	SASARAN	INDIKATOR	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
I	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif				
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat (1)	Indeks Pendidikan	71,99	66,12	91,85
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (2)	Indeks Kesehatan	78,85	78,29	99,29
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (3)	Indeks Pemberdayaan Gender	87,82	87,37	99,48
Indeks Pembangunan Pemuda		44,50	43,28	97,26	
II	Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi				



MISI	SASARAN	INDIKATOR	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Persentase Capaian (%)
	Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah (4)	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan)	7,25	9,51	131,17
	Meningkatnya kesempatan kerja (5)	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93	3,43	130,43
	Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu (6)	Angka Kemiskinan	6,48	7,12	90,12
	Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat (7)	Gini Ratio	0,291	0,32	90,03
III	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan				
	Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi (8)	Indeks Infrastruktur Daerah	65	56	86,15
	Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan (9)	Indeks Desa Membangun	0,714	0,78	109,24
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (10)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70-80 (Baik)	65,04	92,91
IV	Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas				
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (11)	Indeks Pelayanan Publik	4,51-5,00 (A)	3,32	73,61
	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (12)	Nilai LPPD	4,41 (Sangat Tinggi)	3.86 (Tinggi)	87,53
		Nilai SAKIP	80-90 (BB)	68,55	85,69
		Nilai IPKD	60-80	65,2	100,00

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa secara umum persentase capaian indikator kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2026 sudah ada mampu memenuhi target RPJMD yang telah ditetapkan pada beberapa indikator. Dari 15 indikator yang ditetapkan sebagai alat ukur sasaran sebanyak 1 indikator yang sudah memenuhi target akhir RPJMD yaitu indikator nilai IPKD, 4 indikator yang sudah melampaui target akhir RPJMD 2026 dan sebanyak 10 indikator belum melampaui target akhir RPJMD 2021-2026, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja yang melampaui target Akhir RPJMD 2026



- a. Indikator pertumbuhan sektor unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan) yang mengukur pencapaian sasaran meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah dimana persentase capaian kinerjanya sebesar **131,17 persen** terhadap target akhir RPJMD. Capaian kinerja ini merupakan capaian tertinggi dari semua indikator kinerja dan sudah melampaui target akhir RPJMD yang harus diupayakan menjaga konsistensi agar capaian kinerjanya tidak berada dibawah **7,25 persen** mengingat variabel makro ekonomi sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh banyak variabel.
- b. Indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mengukur pencapaian sasaran meningkatnya kesempatan kerja dimana persentase capaian kinerjanya sebesar **130,43 persen** terhadap target akhir RPJMD dimana capaian kinerjanya sudah melampaui target akhir RPJMD yang harus diupayakan menjaga konsistensi agar capaian kinerjanya tidak berada dibawah **4,93 persen**. Indikator TPT adalah indikator yang sangat fluktuatif yang dipengaruhi oleh banyak variabel makro global diluar kendali Pemerintah Daerah seperti kondisi Ekonomi Makro global negara, kebijakan moneter dan fiskal dan perubahan Kemajuan teknologi, walaupun masih ada faktor yang bisa diintervensi Pemerintah Daerah seperti Pendidikan dan Keterampilan Pekerja, Kebijakan penggunaan Tenaga Kerja lokal dan peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja.
- c. Indikator kinerja indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mengukur capaian sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimana persentase capaian kinerjanya sebesar **99,48 persen** terhadap target akhir RPJMD dimana capaian kinerjanya belum melampaui target akhir RPJMD yang harus diupayakan menjaga konsistensi agar capaian kinerjanya tidak menurun. Indikator ini masih memiliki potensi untuk terus mengalami peningkatan mengingat indikator pembentuk IPG cenderung lebih baik seperti persentase



perempuan dalam lembaga legislatif, tingkat akses perempuan dan laki-laki ke pendidikan formal, persentase perempuan dan laki-laki yang bekerja atau mencari pekerjaan, serta rasio antara partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki.

2. Indikator Kinerja yang Sudah Memenuhi target Akhir RPJMD 2026

- a. Indikator nilai IPKD yang mengukur pencapaian sasaran Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana persentase pemenuhan kinerja target akhir RPJMD sebesar **100 persen** dimana capaian kerjanya sebesar **65 persen** sudah memenuhi target akhir RPJMD diangka **60-80 persen**. Indikator ini sangat potensial untuk tetap konsisten bahkan mengalami peningkatan dalam memenuhi target akhir RPJMD sebab variabel pembentuk indikator ini sudah memiliki progres capaian yang sangat baik seperti kinerja pengelolaan keuangan daerah dimana kabupaten Gowa sudah meraih opini pengelolaan keuangan WTP sebanyak 9 kali dan kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa dalam 2 tahun terakhir masuk dalam 10 besar Kabupaten dengan Perencanaan Pembangunan Terbaik secara Nasional oleh Kementerian PPN dan Bappenas.

3. Indikator Kinerja Masih dibawah Target Akhir RPJMD 2026

- a. Indikator kinerja indeks kesehatan yang mengukur capaian sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dimana persentase capaian kerjanya sebesar **99,29 persen** terhadap target akhir RPJMD atau menyisakan kesenjangan (gap) sebesar 0,71 persen sangat realistis dicapai dalam kurun waktu 2 tahun mengingat capaian akhir yang sudah baik dan trend umur harapan hidup terus meningkat serta kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat selalu diurus utamakan dalam Pembangunan Daerah dan selalu menjadi kebijakan mandatori yang didukung oleh kebijakan pendanaan dari Pemerintah Pusat.
- b. Indikator kinerja indeks Pembangunan Pemuda yang mengukur capaian sasaran



Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimana persentase capaian kerjanya sebesar **97,26 persen** terhadap target akhir RPJMD dimana capaian kerjanya sudah masih dibawah target akhir RPJMD yang harus diupayakan adalah mengejar kesenjangan kinerja (gap) sebesar 2,74 persen dalam kurun waktu 2 tahun, jika mengacu pada capaian kinerja tahun 2023 yang hanya meningkat **0,16 point** diperlukan upaya kerja keras dalam mewujudkan target akhir RPJMD.

- c. Indikator kinerja indeks pendidikan yang mengukur capaian sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat dimana persentase capaian kerjanya sebesar **91,85 persen** terhadap target akhir RPJMD atau menyisakan kesenjangan (gap) sebesar 8,15 persen yang harus diupayakan dalam kurun waktu 2 tahun.
- d. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mengukur pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dimana persentase capaian kerjanya sebesar **92,91 persen** terhadap target akhir RPJMD dimana capaian kerjanya masih dibawah target akhir RPJMD yang harus diupayakan adalah meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dikisaran angka 70-80 dalam kurun waktu 2 tahun.
- e. Indikator kinerja angka kemiskinan yang mengukur capaian sasaran berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu dimana persentase capaian kerjanya sebesar **90,12 persen** terhadap target akhir RPJMD dimana capaian kerjanya sudah masih dibawah target akhir RPJMD yang harus diupayakan adalah mengejar kesenjangan kinerja (gap) sebesar **9,87 persen** dalam kurun waktu 2 tahun, jika mengacu pada capaian kinerja tahun 2023 dimana angka kemiskinan hanya turun sebesar **0,24 persen** diperlukan upaya kerja keras dalam mewujudkan target akhir RPJMD angka kemiskinan diangka **6,48 persen**.
- f. Indikator gini ratio yang mengukur pencapaian sasaran menurunnya



ketimpangan pendapatan masyarakat dimana persentase capaian kinerjanya sebesar **90,03 persen** terhadap target akhir RPJMD dimana capaian kinerjanya masih dibawah target akhir RPJMD yang harus diupayakan adalah menurunkan gini ratio diangka **0,291** dalam kurun waktu 2 tahun.

- g. Indikator Indeks Infrastruktur Daerah yang mengukur pencapaian sasaran terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi dimana persentase capaian kinerjanya sebesar **86,15 persen** terhadap target akhir RPJMD dimana capaian kinerjanya masih dibawah target akhir RPJMD yang harus diupayakan adalah meningkatkan indeks Infrastruktur Daerah diangka **65** dalam kurun waktu 2 tahun.
- h. Indikator nilai SAKIP yang mengukur pencapaian sasaran Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana persentase capaian kinerjanya sebesar **85,69 persen** terhadap target akhir RPJMD dimana capaian kinerjanya masih dibawah target akhir RPJMD yang harus diupayakan adalah meningkatkan nilai SAKIP dikisaran angka **80-90 (kategori A)** dalam kurun waktu 2 tahun.
- i. Indikator Indeks Pelayanan Publik yang mengukur pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dimana persentase capaian kinerjanya sebesar **73,61 persen** terhadap target akhir RPJMD dimana capaian kinerjanya masih dibawah target akhir RPJMD yang harus diupayakan adalah meningkatkan indeks pelayanan publik dikisaran angka **4,51-5,0 (kategori A)** dalam kurun waktu 2 tahun.

2.3.2.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR PROVINSI DAN NASIONAL

Perbandingan realisasi antara satu daerah dengan daerah lain diperlukan untuk meningkatkan dan melihat realisasi yang telah berjalan. Realisasi kinerja pemerintah Kabupaten Gowa di tahun 2023 apabila dibandingkan dengan standar Provinsi Sulawesi Selatan dalam dokumen RKPDP Provinsi Sulsel tahun 2023 dan



standar Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (2023) dan Dokumen Rencana Strategis Kementerian Lembaga dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan standar Provinsi dan Standar Nasional Tahun 2023

MIS I	SASARAN	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2023	Standar Provinsi	Standar Nasional
I Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif					
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat (1)	Indeks Pendidikan	66,12	66,81	66,91
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (2)	Indeks Kesehatan	78,29	78,80	82,97
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (3)	Indeks Pemberdayaan Gender	87,37	72,82	91,63
		Indeks Pembangunan Pemuda	43,38	-	55,83
II Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi					
	Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah (4)	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri) Pengolahan)	7,84	4,34	-
	Meningkatnya kesempatan kerja (5)	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,43	4,33	5,3-6,0
	Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu (6)	Angka Kemiskinan	7,12	8,7	7,5-8,5
	Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat (7)	Gini Ratio	0,364	0,377	0,375-0,378
III Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan					
	Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi (8)	Indeks Infrastruktur Daerah	58	60	
	Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan (9)	Indeks Desa Membangun	0,786	0,728	0,615
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (10)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04	62	-
IV Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (11)	Indeks Pelayanan Publik	3,32	4,34	3,88
	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (12)	Nilai LPPD	3.86 (Tinggi)	-	-
		Nilai SAKIP	68,55	B	B
		Nilai IPKD	65,2	64	-



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja di tahun 2023 Kabupaten Gowa bila dibandingkan dengan standar Provinsi dan Standar Nasional di tahun 2023. Terdapat beberapa realisasi kinerja sasaran di tahun 2023 yang bila dibandingkan dengan standar Provinsi dan Nasional berada diatas nilai realisasi kinerja daerah lain.

Realisasi sasaran yang berada diatas standar Provinsi sebanyak 5 sasaran sebagai berikut : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan indikator indeks Pembangunan gender, sasaran meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah dengan indikator Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan), Sasaran terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi dengan indikator Indeks Infrastruktur Daerah, Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

Sebanyak 5 sasaran yang sudah berada diatas standar provinsi dan Nasional yaitu : meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka, berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu dengan indikator Angka Kemiskinan dan menurunnya ketimpangan pendapatan Masyarakat dengan indikator Gini Ratio dan sasaran meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Nilai SAKIP.

Sedangkan realisasi yang masih berada dibawah target Nasional dan provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 2 sasaran yaitu : meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan dan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan.



2.3.2.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Untuk menjawab analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dilakukan pemetaan sasaran dengan hasil disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.11
Pemetaan Sasaran Berdasarkan Kategori Keberhasilan dan Trend Peningkatan dan Penurunan

SASARAN	INDIKATOR	Realisasi 2023	Capaian	Kategori Keberhasilan	Trend Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat (1)	Indeks Pendidikan	66,12	99,43	Berhasil	Trend Naik
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (2)	Indeks Kesehatan	78,29	100,09	Sangat Berhasil	Trend Naik
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (3)	Indeks Pemberdayaan Gender	87,7	99,85	Berhasil	Konstan
	Indeks Pembangunan Pemuda	43,28	99,49	Berhasil	Konstan
Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah (4)	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan)	9,51	135,86	Sangat Berhasil	Trend Naik
Meningkatnya kesempatan kerja (5)	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,43	131,40	Sangat Berhasil	Trend Turun
Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu (6)	Angka Kemiskinan	7,12	81,33	Cukup Berhasil	Trend Naik
Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat (7)	Gini Ratio	0,32	93,33	Berhasil	Trend Naik
Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi (8)	Indeks Infrastruktur Daerah	55,25	95,26	Berhasil	Trend Turun
Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan (9)	Indeks Desa Membangun	0,786	100,77	Sangat Berhasil	Trend Naik
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (10)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04	92,91	Berhasil	Trend Naik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (11)	Indeks Pelayanan Publik	3,32	82,79	Cukup Berhasil	Trend Turun
Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (12)	Nilai LPPD	3.86 (Tinggi)	100,00	Berhasil	Konstan
	Nilai SAKIP	68,55	97,93	Berhasil	Trend Naik
	Nilai IPKD	65,2	100,00	Berhasil	Trend Naik

Selanjutnya dilakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut :



1. Sasaran capaian kinerja sangat berhasil dan mengalami Peningkatan Kinerja (3 Sasaran)

Sasaran capaian kinerja sangat berhasil dan mengalami Peningkatan kinerja merupakan sasaran yang memiliki level keberhasilan kinerja paling tinggi, diperoleh 3 Sasaran dalam IKU yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

a. Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan merupakan sasaran dengan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil dan capaian kinerjanya mengalami peningkatan. Secara umum beberapa Faktor Pendorong sasaran ini **sangat berhasil** dan mengalami **peningkatan Kinerja** di Kabupaten Gowa sebagai berikut :

1) Pengembangan Infrastruktur Kesehatan; Pemerintah kabupaten Gowa terus memberikan layanan kepada masyarakat agar memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas agar mendapatkan perawatan yang lebih baik antara lain melalui perbaikan pelayanan fasilitas Kesehatan dasar dimana sejak Tahun 2022 semua Pusekesmas di Kabupaten sudah menjadi Puskesmas perawatan yang menerima rawat inap, rehabilitasi pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit Syekh Yusuf dengan penambahan Gedung hingga 7 lantai dengan manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pembangunan Rumah Sakit baru. **Indikasi keberhasilan** perbaikan layanan Kesehatan ini antara lain :

- Terjadi penurunan angka kematian bayi dikabupaten Gowa sebesar 8 kematian bayi per 1000 kelahiran ditahun 2022 menjadi 3 kematian per 1000 kelahiran ditahun 2023.
- Terjadi penurunan angka kematian balita 1-5 tahun dikabupaten Gowa sebesar 8 kematian bayi per 1000 kelahiran ditahun 2022 menjadi 3 kematian per 1000 kelahiran pada .
- Terjadi penurunan angka kematian Ibu melahirkan dikabupaten Gowa



sebesar sebanyak 6 ditahun 2022 menjadi 4 kematian pada tahun 2023 .

- 2) Pelibatan masyarakat secara aktif dalam upaya kesehatan antara lain inovasi "*Gassing Nganre*" atau Gerakan pemberian makanan tambahan bergizi (telur dan daun kelor) bagi baduta dan bumil dari partisipasi masyarakat secara mandiri. Gerakan ini menysasar Bayi di bawah dua Tahun (Baduta) dan Ibu hamil yang melibatkan 7 Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Tanaman Pangan dan Dinas Sosial. **Indikasi keberhasilan** dari gerakan ini mampu menurunkan pravelensi stunting Kabupaten Gowa 5,53 persen pada tahun 2022 menjadi 4,50 ditahun 2023.
- 3) Peran Pemerintah dalam kebijakan Kesehatan utamanya dalam menjaga konsistensi Pemerintah Kabupaten Gowa menjadikan urusan kesehatan menjadi prioritas dalam Pembangunan dengan konsiten memenuhi anggaran Kesehatan sebesar 15 - 20 persen dan dukungan Pemerintah pusat dalam menguatkan prioritas kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan dan Bantuan operasional Kesehatan dengan data sebagai berikut:
 - Alokasi belanja Kesehatan dalam APBD 2022 329 Milyar meningkat dari tahun 2023 menjadi 455 Milyar;
 - Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan meningkat tahun 2022 6,5 Milyar meningkat menjadi 8,5 juta tahun 2023;
 - Belanja operasional kesehatan (BOK) meningkat tahun 2022 3,5 Milyar meningkat menjadi 6 Milyar tahun 2023;
- 4) Kebijakan pembangunan lingkungan yang sehat; Lingkungan yang bersih dan aman memainkan peran kunci dalam mendukung kesehatan masyarakat. Upaya untuk mengendalikan polusi udara, pengelolaan limbah yang baik, serta pemberantasan vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus dapat membantu mencegah penyakit menular. **Indikasi dari keberhasilan**



Program ini dengan menurunnya jumlah penderita penyakit akibat kondisi lingkungan tempat seseorang tinggal atau beraktivitas antara lain:

- Jumlah penderita diare di Kabupaten Gowa tahun 2023 sebanyak 1.312 kasus menurun jika dibandingkan tahun 2022 sebanyak 1.278 kasus;
- Jumlah penderita penyakit Malaria di Kabupaten Gowa tahun 2023 sebanyak 18 kasus menurun jika dibandingkan tahun 2022 sebanyak 12 kasus;
- Jumlah penderita penyakit demam berdarah di Kabupaten Gowa tahun 2023 sebanyak 362 kasus menurun jika dibandingkan tahun 2022 sebanyak 276 kasus;

b. Sasaran meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah dengan indikator Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan) dikategorikan sangat berhasil dan capaian kinerjanya mengalami peningkatan. Secara umum beberapa hal yang mendorong ketercapaian sasaran ini di kabupaten Gowa sebagai berikut :

- Peningkatan pertumbuhan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh dalam struktur PDRB Kabupaten Gowa sebesar **3,34 persen** pada tahun 2022, menjadi **4,41 persen** pada tahun 2023 yang ditandai dengan meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura unggulan di kabupaten Gowa sebagai berikut : (1) produksi padi mengalami peningkatan tahun 2022 sebesar 428.118 ton menjadi 436.680 ton ditahun 2023. (2) produksi jagung mengalami peningkatan tahun 2022 sebesar 315.896 ton menjadi 322.213 ton ditahun 2023. (3) produksi kentang mengalami peningkatan tahun 2022 sebesar 40.470 ton menjadi 40.900 ton ditahun 2023. (4) produksi cabai mengalami peningkatan tahun 2022 sebesar 2.432 ton menjadi 2.485 ton ditahun 2023;



- Peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan dalam struktur PDRB Kabupaten Gowa, lapangan usaha industri pengolahan tumbuh sebesar **12,35 persen** pada tahun 2022 menjadi **13,00 persen** ditahun 2023, secara umum fakta yang mendukung adalah berdasarkan data realisasi penanaman modal dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gowa dimana terjadi peningkatan nilai investasi penanaman modal dari industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan tekstil, industri pengolahan tanaman pertanian dari Rp. 130.381.422.233 di tahun 2022 menjadi Rp. 173.841.896.310 ditahun 2024.
- c. Sasaran Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan dengan indikator indeks Desa membangun dikategorikan sangat berhasil dan capaian kerjanya mengalami peningkatan. Secara umum beberapa hal yang mendorong ketercapaian sasaran ini di kabupaten Gowa adalah meningkatnya status kemajuan kemandirian desa dengan capaian 54 Desa (44,63 persen) Desa mandiri, 57 Desa (47,11 persen) Desa maju dan 10 Desa (8,26 persen) Desa maju. Peran pemerintah Kabupaten Gowa sangat penting dalam kemajuan desa. Berikut adalah beberapa peran utama yang telah dilakukan dalam memajukan desa:
 - Pengembangan Infrastruktur; Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, sanitasi, dan telekomunikasi di desa-desa. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk desa dan mendorong perkembangan ekonomi lokal.
 - Pembangunan Ekonomi Lokal; Pemerintah daerah dapat mendukung pembangunan ekonomi lokal di desa dengan memberikan bantuan dan insentif kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong investasi di sektor-sektor yang potensial seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan kerajinan lokal.
 - Pemberdayaan Masyarakat; Pemerintah daerah harus memfasilitasi



pemberdayaan masyarakat desa dengan memberikan pelatihan keterampilan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan taraf hidup penduduk desa.

- Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan; Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas di desa-desa, termasuk pembangunan dan pengelolaan puskesmas, sekolah dasar, dan sekolah menengah.

2. Sasaran Capaian Kinerja Sangat Berhasil dan Mengalami Penurunan Kinerja (1 Sasaran)

Sasaran capaian kinerja sangat berhasil dan mengalami Penurunan kinerja merupakan sasaran yang capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan akan tetapi mengalami penurunan kinerja sehingga dibutuhkan alternatif solusi agar kinerjanya meningkat. Dari hasil analisis diperoleh 3 Sasaran dalam IKU yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

- a. Sasaran Meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dikategorikan **sangat berhasil** karena realisasi tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Gowa tahun 2023 sebesar 3,43 persen **lebih rendah** dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 sebesar 5 persen, akan tetapi capaian kinerja tersebut mengalami penurunan realisasi kinerja dari tahun 2022 sebesar 3,26 persen. Tingkat pengangguran Kabupaten Gowa tahun 2023 yang lebih tinggi dari tahun 2022 yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- Akibat pengaruh kontraksi ekonomi tahun 2022 yang dialami Kabupaten Gowa yang dampaknya masih berlanjut sampai tahun 2023 sehingga beberapa perusahaan cenderung untuk mengurangi produksi tidak menambah tenaga kerja baru untuk menyesuaikan dengan permintaan yang menurun, sementara angkatan kerja Kabupaten Gowa tahun 2023 terus



mengalami peningkatan dimana tahun 2023 meningkat sebesar 4,15 persen atau mengalami peningkatan sebesar 16.932 orang dimana tahun 2022 sebanyak 424.437 orang dan tahun 2022 sebanyak 407.505 orang.

- Perubahan struktur PDRB dalam perekonomian kabupaten Gowa dimana terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa meskipun lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih dominan tercatat persentasenya tahun 2022 sebesar 29,53 persen menjadi 28,47 persen di tahun 2022 mengakibatkan tenaga kerja di lapangan usaha tersebut harus melakukan penyesuaian dan yang tidak bisa akan menjadi pengangguran.
- Perubahan dalam pola migrasi penduduk di Kabupaten Gowa yang merupakan daerah penyanggah ibukota dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dimana pertumbuhan populasi penduduk Kabupaten Gowa akibat migrasi sangat tinggi tanpa disertai pertumbuhan lapangan kerja yang memadai dapat menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran.

Untuk mengantisipasi dampak meningkatnya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Gowa akibat ketiga hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan berbagai alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- Perluasan kebijakan pengutamakan tenaga kerja lokal pada berbagai perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gowa dimana Perusahaan harus melaksanakan ketentuan penggunaan minimal 30 persen tenaga kerja lokal sebagai syarat membuka usaha di Kabupaten Gowa.
- Penguatan Inovasi Produktivitas Simultan Rumah Produktif (Proksi-Rumah Produktif) yang bertujuan meningkatkan keberdayaan warga masyarakat agar mengalami perubahan dari kondisi tidak memiliki pekerjaan menjadi berusaha, menciptakan UMKM/IKM baru (minimal usaha mikro) melalui keluarga berpendapatan rendah dan tidak menentu guna mendorong produktivitas masyarakat dan mendorong pelaku UMKM/IKM (target kecil dan



menengah) melakukan diversifikasi usaha melalui produksi beberapa produk. Sampai saat ini inovasi ini sudah berhasil menciptakan pertambahan jumlah kluster ekonomi yang menjadi magnet kegiatan ekonomi daerah mencapai di Kabupaten Gowa di 167 Desa dan Kelurahan.

3. Sasaran dengan capaian Berhasil dan mengalami Peningkatan Kinerja (4 Sasaran)

Sasaran capaian kinerja berhasil dan mengalami Peningkatan kinerja merupakan sasaran yang capaian kinerjanya dibawah target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan kinerja sehingga dibutuhkan alternatif solusi agar di tahun berikutnya capaian kinerjanya bisa sama bahkan diatas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari hasil analisis diperoleh 3 Sasaran dalam IKU yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

- a. Sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan dikategorikan **berhasil** dengan capaian kinerjanya **99,43 persen**, realisasi kinerja 66,12 poin sudah mendekati target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 66,50 poin dan indikator indeks pendidikan menunjukkan trend peningkatan ditahun 2023 dari tahun 2022 sebesar 65,94 poin. Capaian ini tidak terlepas dari 2 indikator pembentuk indeks pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gowa naik dari 13,66 pada tahun 2022 menjadi 13,70 tahun di tahun 2023 sedangkan rata-rata lama sekolah naik walaupun tidak signifikan dari 8,40 tahun 2022 menjadi 8,41 tahun di tahun 2023.

Beberapa hal yang mendorong capaian kinerja sasaran berhasil dan mengalami peningkatan kinerja sebagai berikut :

- Pembangunan bidang Pendidikan menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Gowa sejak tahun 2005 dan Pemerintah pusat hingga saat ini yang didukung oleh kebijakan penganggaran yang maksimal paling sedikit



20 persen ditambah dengan dukungan Pemerintah pusat dengan alokasi DAK Pendidikan.

- Ketersediaan sekolah dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat memengaruhi rata-rata lama sekolah, semakin mudahnya akses pendidikan, baik secara fisik maupun finansial, akan mendorong lebih banyak orang agar anaknya menempuh pendidikan lebih lama. Realisasi dari program Investasi SDM seperempat abad yang merupakan beasiswa penuh bagi siswa prasejahtera dan berprestasi asal Gowa yang akan melanjutkan pendidikan tinggi hingga saat ini total penerimanya sebanyak 1973 Orang dengan anggaran sebesar 138,4 Milyar yang tersebar di 16 Perguruan tinggi ternama dalam dan luar negeri yaitu luar negeri *Al-Azhar Univercity*, luar Sulawesi Selatan adalah Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada , Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor dan dalam Sulawesi Selatan adalah Universitas hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Islam Makassar, Universitas Muslim Indoesia, dan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kebijakan pemerintah Pemerintah terkait dengan pendidikan seperti kebijakan wajib belajar dan program beasiswa, juga memengaruhi tingkat partisipasi dan lama tinggal siswa di sekolah melalui inovasi Pendidikan gratis dan sistem kelas tuntas berkelanjutan. Sistem Pendidikan gratis adalah sistem pendidikan bebas biaya sampai dengan jenjang pendidikan SMP yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Gowa Nomor 4 tahun 2008 tentang pendidikan gratis dimana orang tua siswa bisa dituntut dengan hukuman Pidana apabila tidak menyekolahkan anaknya minimal SMP. Sementara itu sistem kelas tuntas berkelanjutan adalah inovasi pendidikan adalah kebijakan program pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang berupaya memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada



peserta didik melalui strategi penuntasan semua standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran yang menyerupai sistem SKS pada perguruan tinggi serta tidak mengenal tinggal kelas dan tidak lulus. Indikasi keberhasilan dari 2 program ini bisa dilihat dari angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar di kabupaten Gowa mencapai angka 100 persen dalam 3 tahun terakhir.

Alternatif solusi yang diharapkan terus dilakukan agar capaian kinerjanya bisa memenuhi target dan tetap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebagai berikut :

- **Kebijakan Pendidikan Inklusif melalui Inovasi Rumahku Sekolahku (Rukoku);** Memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial atau keadaan pribadi, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Ini termasuk menyediakan layanan pendukung bagi siswa dengan kebutuhan khusus dan menghapus hambatan-hambatan seperti biaya pendidikan yang tinggi.
- **Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Lembaga Pendidikan:** Berkolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk menyediakan program pelatihan, magang, dan beasiswa bagi siswa yang ingin mengejar pendidikan lanjutan tetapi mungkin menghadapi kendala keuangan.
- **Program Pendidikan Berbasis Komunitas:** Mengembangkan program-program pendidikan yang memperhitungkan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat, serta memberikan konten pendidikan yang relevan dengan realitas lokal dan kemungkinan karir di daerah tersebut.
- **Inisiatif Pembangunan Infrastruktur:** Memastikan bahwa infrastruktur pendidikan, seperti sekolah dan fasilitas pendukungnya, memadai dan terjangkau bagi semua warga. Ini termasuk menyediakan aksesibilitas bagi siswa dari daerah terpencil atau terpencil.



b. Sasaran Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat dengan indikator Gini Ratio dikategorikan berhasil dengan capaian kinerjanya 93,33 persen, realisasi kinerja 0,32 sudah mendekati target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 0,30 poin dan indikator gini ratio menunjukkan ketimpangan ekonomi di Kabupaten Gowa semakin kecil ditahun 2023 dari tahun 2022 sebesar 0,36 poin. Nilai Gini Ratio memiliki skala nilai antara 0 dan 1, tingkat ketimpangan berdasarkan di mana nilai Gini Ratio berada di dalam skala tersebut dan semakin dekat ke 1, semakin besar ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan ketimpangan ekonomi di kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

- Akses yang merata terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Gowa dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi melalui Jaminan kesehatan (BPJS). Pemerintah Kabupaten Gowa terus mendorong kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan upaya yang dilakukan saat ini kondisi kepesertaan JKN-KIS tahun 2023 sudah mencapai 90,55 persen atau 696.213 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Gowa dimana di tahun 2022 baru berada di angka 82 persen. Saat ini masih ada sekitar 72.655 orang yang belum menjadi peserta JKN-KIS yang perlu terus ditingkatkan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) dengan kepesertaan JKN harus mencapai 95 persen lebih.
- Akses terhadap Pekerjaan dan Peluang Ekonomi; Kesempatan yang merata untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berupah tinggi dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi yang dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan, program dukungan untuk kewirausahaan, dan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif.



- Akses terhadap Modal dan Kredit: Memfasilitasi akses terhadap modal dan kredit bagi kelompok yang kurang mampu secara finansial dapat membantu meningkatkan kesempatan ekonomi mereka dan mengurangi ketimpangan.
- c. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup memiliki capaian kinerja yang berhasil dengan capaian sebesar 92,91 persen dengan realisasi sebesar 65,04 (Sedang) walaupun masih berada dibawah yang ditargetkan sebesar 70-80 (Baik). Indeks kualitas lingkungan kabupaten Gowa tahun 2023 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 64,51 di tahun 2022 dan sebesar 65,04 ditahun 2023. Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks kualitas lingkungan sangat kompleks dan saling terkait. Untuk meningkatkannya diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan nasional dan internasional untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan diuraikan sebagai berikut:
- Kualitas Air yang semakin baik: Kandungan bahan kimia berbahaya dalam air, termasuk logam berat, pestisida, dan zat-zat organik berbahaya, dapat mempengaruhi indeks kualitas air. Upaya yang dilakukan yang dilakukan berupa kampanye edukatif bagi masyarakat dan dunia usaha di sekitar Daerah Aliran Sungai Jeneberang terkait bahaya polusi air yang bisa berasal dari pembuangan limbah industri, pertanian, perkotaan, dan kegiatan manusia lainnya. **Indikasi keberhasilannya** tergambar dari hasil Indeks Kualitas Air Kabupaten Gowa yang meningkat masing-masing sebesar 50 ditahun 2021, sebesar 52,73 tahun 2022 dan sebesar 57,14 tahun 2023;
 - Upaya konservasi sumber daya alam seperti hutan, lahan dan keanekaragaman hayati diupayakan Pemerintah kabupaten Gowa untuk mencegah hilangnya habitat alami, deforestasi, dan degradasi lahan dapat



menurunkan kualitas lingkungan secara keseluruhan antara lain melalui kegiatan penghijauan secara berkelanjutan di lahan-lahan kritis yang rawan bencana longsor. Indikasi peningkatan dari 43,50 persen ditahun 2022 menjadi 44,97 di tahun 2023 masih dalam kategori kurang mengindikasikan kegiatan konservasi memerlukan intervensi yang lebih massif.

- Faktor tingkat polutan udara seperti partikulat, oksida nitrogen, sulfur dioksida, ozon, dan karbon monoksida dapat berkontribusi pada Sumber polusi udara dapat berasal dari industri, transportasi, pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas manusia lainnya. Berdasarkan hasil indeks kualitas udara di Kabupaten Gowa mengalami penurunan yaitu dari 86,80 di tahun 2022 menjadi 83,23 di tahun 2023 walaupun masih dalam kategori sedang artinya tingkat mutu udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Tingkat polusi udara di Kabupaten Gowa sangat dipengaruhi letak geografis kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar utamanya di Kecamatan Sombaopu, Pallangga, Barombong dan Pattalassang. **Alternatif Solusi** yang dilakukan untuk mengurangi hal tersebut antara lain : (1) Transportasi Berkelanjutan melalui Bus Trans Maminasata yang merupakan transportasi massal yang menghubungkan Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Maros yang prakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dan Provinsi Sulawesi Selatan guna mengurangi penggunaan mobil pribadi dengan berpindah ke transportasi umum dapat mengurangi emisi kendaraan bermotor. (2) Pemerintah juga memperketat peraturan dan menegakkan hukum terkait emisi polutan udara dari industri dengan melakukan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap industri yang ada di Kabupaten Gowa. (3) Penanaman lebih banyak pohon dan pengembangan taman di kota Sungguminasa yang diharapkan dapat membantu menyerap polutan udara



dan meningkatkan kualitas udara.

d. Sasaran meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator nilai SAKIP dan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan nilai LPPD dengan capaian 95,18 persen kategori berhasil, sedangkan ketiga indikator kinerjanya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya kecuali nilai LPPD yang masih diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya karena nilainya belum di rilis secara resmi.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan sasaran ini sebagai berikut :

- Praktek Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa yang semakin baik dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan beberapa indikasi keberhasilan antara lain : (1) keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gowa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 kali dari BPK Republik Indonesia (2) penetapan dan pengesahan APBD Kabupaten Gowa yang tepat waktu dalam 3 tahun terakhir (3) Rasio Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah yang terus meningkat sebesar 9,35 persen ditahun 2022 menjadi 10,33 ditahun 2023 dan (4) proporsi silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) yang semakin mengecil 14,66 persen ditahun 2022 menjadi 8,01 persen di tahun 2023.
- Implementasi SAKIP yang semakin baik; Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa 2022 menunjukkan nilai sebesar 68,55 dengan predikat “B” dan tahun sebelumnya sebesar 66,67 Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “ Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. **Solusi alternatif** yang akan dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi AKIP sesuai dengan saran Kementerian PAN RB adalah : (1) Bappeda akan melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan pada beberapa OPD untuk memastikan memastikan bahwa



tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) (2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen penjenjangan kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor (CSF)* atas pencapaian kinerja (3) Melakukan analisa dalam penetapan target yang achievable dan menantang dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya dan sumber daya yang ada (4) Melakukan penyempurnakan IKU di sebagian Perangkat Daerah dengan formulasi perhitungan dan sumber data sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja yang andal; (5) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-sakip yang dibangun kepada seluruh Perangkat Daerah dan memantau kepatuhan pengisian seluruh Perangkat Daerah di aplikasi tersebut sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerjanya secara real time (6) pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, penilaian kinerja organisasi dan penilaian kinerja individu serta pemberian TPP di Pemerintah Kabupaten Gowa (8) Menyempurnakan kualitas laporan kinerja di level Pemerintah Daerah dan OPD dengan menyajikan analisis faktor pendukung keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi ke depan;

e. Sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan indikator indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan pemuda dikategorikan berhasil dengan capaian sebesar 99,72 persen namun demikian indikator sasaran indeks pembangunan gender mengalami penurunan di tahun 2023 dan indeks pembangunan pemuda mengalami peningkatan di tahun 2023. Faktor penghambat indikator **indeks pembangunan gender** di kabupaten Gowa mengalami penurunan dikemukakan sebagai berikut :

- Diskriminasi dan kekerasan gender adanya diskriminasi gender dan tingginya



tingkat kekerasan terhadap perempuan dapat menghambat kemajuan menuju kesetaraan gender dan berkontribusi pada penurunan IPG. indikasi dari persoalan ini masih tingginya angka tingkat kekerasan terhadap perempuan dimana tahun 2022 sebanyak 15 kasus dan tahun 2023 meningkat menjadi 42 kasus kekerasan terhadap perempuan. **Alternatif Solusi** yang sebaiknya dilakukan adalah optimalisasi penguatan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan sebagai fasilitas yang menyediakan tempat tinggal sementara dan layanan lainnya bagi perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan gender lainnya. Rumah perlindungan ini biasanya menyediakan tempat tinggal aman, bimbingan, konseling, dukungan psikologis, serta bantuan hukum.

- Belum optimalnya Akses dan kualitas layanan kesehatan bagi perempuan termasuk akses ke pelayanan reproduksi dan pelayanan kesehatan bagi perempuan mudah dijangkau baik untuk pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan di RSUD. Indikasi permasalahan ini tergambar masih tingginya angka kematian Ibu melahirkan di Kabupaten Gowa sebanyak 12 kasus di tahun 2023. **Alternatif solusi** melalui berbagai pendekatan ini dapat membantu mengurangi angka kematian ibu melahirkan secara signifikan dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan seperti (1) meningkatkan akses perempuan hamil kepada perawatan kesehatan yang berkualitas adalah langkah kunci untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Ini mencakup akses terhadap layanan antenatal, persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan yang terlatih, serta perawatan pasca persalinan yang memadai. (2) memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada perempuan, pasangan mereka, dan masyarakat secara umum penting untuk meningkatkan kesadaran tentang tanda bahaya selama kehamilan dan persalinan, serta pentingnya pencarian perawatan kesehatan yang tepat waktu. (3) Memastikan akses terhadap kontrasepsi yang



aman dan terjangkau juga merupakan langkah kunci untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mengurangi risiko komplikasi saat melahirkan.

f. Sasaran terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi dengan indikator indeks infrastruktur daerah dikategorikan berhasil dengan capaian sebesar 96,50 persen besaran indeks infrastruktur daerah yang dicapai tahun 2023 sebesar 57,80 poin mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 58 poin walaupun masih dibawah dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 58 poin. Beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga **indeks infrastruktur daerah** tahun 2023 belum mencapai target sesuai di Perjanjian Kinerja kendala utamanya adalah keterbatasan dana yang tersedia untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Gowa sering kali harus bergantung pada alokasi anggaran yang terbatas dari pemerintah pusat atau sumber pendanaan lainnya yang mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan infrastruktur, sehingga mengakibatkan progres pembagunan infrastruktur sangat sangat lambat sebagai berikut :

- Masih tingginya kondisi jalan yang tidak baik; kondisi jalan Kabupaten Gowa dalam kondisi baik tahun 2023 sebesar 95,76 persen atau 2362,15 km dari 2466,7 Km atau masih ada sekitar 104,58 km yang tidak dalam kondisi baik ditambah lagi jalan provinsi 282,33 Km dan jalan Nasional 30,30 Km yang tidak bisa diintervensi oleh langsung Pemerintah Kabupaten Gowa.
- Rendahnya Persentase drainase dalam kondisi baik hingga tahun 2023 baru mencapai 70,10 persen atau masih menyisakan 29,90 % atau sekitar 120 km
- Rendahnya Persentase Ketersediaan jalan lingkungan pada kawasan permukiman hingga tahun 2023 baru 54,20 persen atau masih menyisakan 46,80 persen
- Sebagian besar jalan di Kabupaten Gowa belum dilengkapi perlengkapan jalan



raya sebagai peralatan yang digunakan untuk memperbaiki atau menandai jalan, memberikan keselamatan bagi pengguna jalan, atau memberikan bantuan saat terjadi keadaan darurat di jalan raya hingga tahun 2023. Persentase perlengkapan jalan baru sebesar 34,27 persen, artinya sebagian besar jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten belum dilengkapi perlengkapan jalan.

Alternatif solusi yang sebaiknya dilakukan :

- Peningkatan Alokasi Anggaran: Pemerintah kabupaten Gowa selama ini telah konsisten mengalokasikan alokasi minimal **20 persen** untuk pembangunan infrastruktur, perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dengan mencari alternatif pembiayaan yang memadai dan menetapkan prioritas yang jelas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Peningkatan Koordinasi antar lembaga; Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan keselarasan dan kesinambungan dalam pembangunan infrastruktur. Beberapa ruas jalan merupakan kewenangan provinsi dengan koordinasi yang baik bisa dibiayai melalui mekanisme bantuan keuangan ke Kabupaten Gowa demikian pula untuk infrastruktur kewenangan Pemerintah Pusat bisa diselesaikan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Peningkatan Tata Kelola Proyek: Memperkuat tata kelola proyek infrastruktur dengan menerapkan praktik-praktik manajemen proyek yang baik, termasuk pemantauan dan pengawasan yang ketat, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan.



4. Sasaran dengan capaian Cukup Berhasil dan mengalami Peningkatan Kinerja (1 Sasaran)

Sasaran dengan capaian cukup Berhasil dan mengalami Peningkatan Kinerja merupakan kategori capaian sasaran yang rendah pada analisis ini yaitu pada berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu dengan indikator persentase penduduk miskin dengan capaian kinerja 81,33 persen walaupun persentase penduduk miskin Kabupaten Gowa mengalami penurunan dari 7,36 pada tahun 2022 menjadi 7,36 di tahun 2023.

Beberapa faktor yang menyebabkan kinerja indikator ini berada dibawah target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

- Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa Maret tahun 2023 sedikit menurun dibandingkan periode Maret 2022. Penurunan tingkat kemiskinan sejalan dengan penurunan indeks harga bahan makanan dan nonmakanan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Gowa Selatan rentan dipengaruhi pergerakan harga.
- Komposisi penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Peningkatan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa didorong oleh peningkatan jumlah penduduk miskin perkotaan yang dipengaruhi oleh arus migrasi yang lebih tinggi sebagai daerah penyanggah Ibukota Makassar akan meningkatkan persentase penduduk miskin. Sedangkan meningkatnya penduduk miskin perdesaan kabupaten Gowa dipengaruhi oleh faktor keberhasilan panen komoditas utama yang ada di pedesaan

Solusi alternatif untuk mengurangi penduduk miskin di Kabupaten Gowa melalui 3 strategi sebagai berikut :

- Peningkatan Pendapatan masyarakat; Peningkatan pendapatan masyarakat miskin merupakan tujuan yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Berikut adalah beberapa upaya yang



dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin:

- 1) Melakukan investasi dalam pelatihan keterampilan dan pendidikan bagi masyarakat miskin dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan dan kualifikasi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Program pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal agar memberikan manfaat yang nyata.
 - 2) Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Memberikan dukungan kepada UKM dengan memberikan akses ke modal, pelatihan, dan bantuan teknis dapat membantu masyarakat miskin untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri. Ini dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan mereka.
 - 3) Pengembangan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih di daerah pedesaan dapat membuka akses baru ke pasar dan layanan, serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin yang bergantung pada sektor pertanian atau usaha lainnya.
- Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengurangi beban penduduk miskin. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:
- 1) Program Bantuan Sosial: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan program bantuan sosial seperti bantuan pangan, bantuan pendidikan, atau bantuan kesehatan bagi penduduk miskin. Program ini dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka.
 - 2) Infrastruktur Dasar: Membangun infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, jalan yang baik, dan listrik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin dan membuka



aksesibilitas terhadap kesempatan ekonomi.

- 3) Penguatan Jaringan Sosial: Membangun dan memperkuat jaringan sosial dan komunitas lokal untuk memberikan dukungan sosial dan emosional bagi penduduk miskin, serta memfasilitasi pertukaran informasi dan sumber daya.

5. Sasaran dengan capaian Cukup Berhasil dan mengalami Penurunan Kinerja (1 Sasaran)

Sasaran dengan capaian cukup Berhasil dan mengalami Penurunan Kinerja merupakan kategori capaian sasaran yang paling rendah pada analisis ini yaitu pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik. Capaian kinerja indeks pelayanan Kabupaten Gowa tahun 2023 hanya sebesar 82,79 dengan realisasi IPP sebesar 3,32 dari range nilai IPP 4,01-4,50 (A-) yang ditargetkan, sementara itu realisasi IPP 2 tahun terakhir juga mengalami trend penurunan yaitu 4,02 pada tahun 2021, nilai 4,00 ditahun 2022 dan nilai 3,32 di tahun 2023. Faktor utama Indeks Pelayanan Publik 2023 tidak berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan dan trend kinerjanya menurun adalah karena pada penilaian IPP tahun 2023 menjadikan Kecamatan sebagai sampel untuk Pelayanan Administrasi. Kondisi Pelayanan Publik di Kecamatan Kabupaten Gowa saat ini dihadapkan pada berbagai masalah karena 9 dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gowa berada di daerah terpencil dataran tinggi menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut :

- Aksesibilitas: Lokasi geografis yang sulit dijangkau dapat menghambat akses penduduk ke fasilitas dan layanan publik. Jarak yang jauh dari pusat layanan dan transportasi yang terbatas bisa membuat sulit bagi penduduk untuk mengakses layanan dasar administrasi pemerintahan, di Kecamatan Tompobulu misalnya harus masyarakat mengeluarkan biaya transportasi 600 Ribu Rupiah untuk bisa menjangkau pelayanan publik di Ibukota Kabupaten



Gowa dan membutuhkan waktu 6 jam untuk perjalanan.

- Kurangnya Petugas Administrasi: Kecamatan yang jauh atau terpencil sering mengalami kekurangan petugas administrasi yang terlatih atau memiliki pengetahuan yang cukup dalam menangani proses administrasi yang rumit. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian dokumen atau permintaan administrasi dari masyarakat.
- Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi: Kurangnya akses internet, atau komunikasi yang memadai di kecamatan yang jauh dapat mempengaruhi ketersediaan layanan administrasi yang bersifat online atau elektronik. Selain itu, kurangnya infrastruktur teknologi informasi di kantor pemerintah juga dapat menyulitkan proses administrasi yang efisien.
- Keterbatasan Peraturan dan Prosedur: Kadang-kadang, prosedur administrasi yang kompleks atau berbelit-belit dapat menjadi kendala bagi masyarakat di kecamatan yang jauh, terutama jika mereka tidak memiliki akses mudah ke informasi atau bantuan untuk memahami dan melengkapi dokumen yang diperlukan.

Alternatif Solusi yang dilaksanakan: Pemerintah Kabupaten Gowa di tahun 2023 telah mengoperasikan Mall Pelayanan Publik dan Pos Pelayanan Publik di 6 Kecamatan terpencil di dataran tinggi yang mengakomodasi 147 jenis pelayanan yang meliputi 12 OPD, 8 BUMN dan BUMD dan 9 instansi vertikal. Mall Pelayanan Publik diharapkan mempermudah akses bagi 9 Kecamatan dataran rendah untuk mendapatkan pelayanan publik sedangkan Pos Pelayanan Publik diperuntukkan bagi masyarakat dataran tinggi di Kecamatannya masing-masing.

Mall Pelayanan Publik dan Pos Pelayanan Publik Kecamatan adalah fasilitas yang menyediakan berbagai layanan publik secara terpusat, kemudahan pelayanan yang didapatkan yang diharapkan bisa menjawab tantangan penyelenggaraan pelayanan publik diatas sebagai berikut :

- Aksesibilitas: Lokasi Mall Pelayanan Publik dan Pos Pelayanan Publik terletak



dilokasi yang strategis membuatnya mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Hal ini memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan publik tanpa harus berkunjung ke kantor pemerintah yang jauh.

- Kenyamanan Fasilitas ; Mall Pelayanan Publik dan Pos Pelayanan Publik dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman seperti area tunggu, ruang pendaftaran, dan fasilitas penunjang lainnya yang membuat proses mendapatkan layanan menjadi lebih nyaman bagi pengunjung.
- Layanan Terpusat; Di dalam Mall Pelayanan Publik dan Pos Pelayanan Publik, berbagai jenis layanan publik seperti pembuatan KTP, pembayaran pajak, pendaftaran pernikahan, dan lain sebagainya disediakan secara terpusat dalam satu tempat. Hal ini memudahkan pengunjung untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan tanpa harus mengunjungi berbagai tempat yang berbeda.
- Pelayanan yang cepat dan efisien**: Dengan adanya fasilitas yang terpusat dan sistem yang terorganisir dengan baik, proses pelayanan Mall Pelayanan Publik dan Pos Pelayanan Publik biasanya lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pelayanan di kantor pemerintah yang mungkin memiliki antrian yang panjang atau prosedur yang rumit.
- Penggunaan Teknologi; Mall Pelayanan Publik dan Pos Pelayanan Publik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Misalnya, penggunaan mesin ATM untuk pembayaran pajak atau penggunaan sistem antrian online untuk menghindari kerumunan.
- Pendekatan Layanan yang Ramah Pengguna; Layanan di Mall Pelayanan Publik dan Pos Pelayanan Publik dijalankan dengan pendekatan yang lebih ramah pengguna dan lebih bersahabat, yang membuat pengalaman pengunjung menjadi lebih positif.
- Informasi yang Lengkap; Di Mall Pelayanan Publik dan Pos Pelayanan Publik, pengunjung dapat dengan mudah memperoleh informasi lengkap mengenai



berbagai layanan yang disediakan, persyaratan yang diperlukan, serta biaya yang harus dibayar.

2.3.2.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Keberhasilan maupun kegagalan dari kinerja organisasi dapat diukur dengan tiga aspek yaitu berdasarkan capaian, anggaran, dan sumber dayanya. Pengukuran kinerja berdasarkan aspek tersebut dapat dikatakan efisien atau tidak efisien yang ditentukan berdasarkan acuan efisien jika tingkat efisiensinya ≥ 100 , cukup efisien jika tingkat efisiensinya $90 \leq 100$ dan tidak efisien jika tingkat efisiensinya < 90 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.12 Analisis asat Efisiensi penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)	Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	66,5	66,12	99,43	565.048.070.831	559.002.056.473	98,93	100,50	Efisien
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	78,22	78,29	100,09	124.028.240.459	118.631.344.774	95,65	104,64	Efisien
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	87,83	87,8337	100,00	2.138.754.282	2.133.621.272	99,76	100,24	Efisien
	Indeks Pembangunan Pemuda	43,5	43,28	99,49	6.954.886.726	6.466.653.678	92,98	107,01	Efisien
Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan)	7,00	9,51	135,86	45.461.300.115	44.039.991.222	96,87	140,24	Efisien
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5	3,43	131,40	44.039.991.222	43.039.661.222	97,73	134,45	Efisien
Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	6	7,12	81,33	26.608.531.827	23.561.670.208	88,55	91,85	Cukup Efisien
Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Gini Ratio	0,3	0,32	93,33	32.520.476.735	28.454.610.645	87,50	106,67	Efisien



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

SASARAN	INDIKATOR	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)	Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi	Indeks Infrastruktur Daerah	55	55	100,00	489.349.911.384	356.487.423.794	72,85	137,27	Efisien
Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,78	0,78	100,00	8.052.117.249	8.034.402.591	99,78	100,22	Efisien
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70-80 (Baik)	65,04	92,91	14.491.011.063	14.138.879.494	97,57	95,23	Cukup Efisien
Meningkatnya kualitas pelayanan publik)	Indeks Pelayanan Publik	4,01-4,50 (A-)	3,32	82,79	13.028.733.730	10.747.402.454	82,49	100,37	Efisien
Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	3.86 (Tinggi)	3.86 (Tinggi)	100,00	1.449.061.400	1.369.942.648	94,54	105,78	Efisien
	Nilai SAKIP	70-80 (BB)	68,55	97,93	2.100.037.690,00	1.499.766.848	71,42	137,12	Efisien
	Nilai IPKD	60-80	65,2	100,00	276.753.563.741	243.490.130.907	87,98	113,66	Efisien
Rata-Rata								111,68	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perbandingan capaian kinerja dan anggaran pada setiap program prioritas Pemerintah Kabupaten Gowa telah terdapat efisiensi kinerja. Secara umum tingkat efisiensi pada program prioritas Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 2022 telah berada pada angka di atas 100% dengan rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dari capaian anggaran. Namun, masih terdapat beberapa prioritas yang memiliki capaian kinerja di bawah capaian anggaran. Hal ini terlihat pada sasaran Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

2.3.2.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Setiap program atau kegiatan telah ditetapkan adanya indikator kinerja sebagai pendukung dari capaian indikator kinerja utama. Berikut ini adalah analisis



program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pada Pemerintah Kabupaten tahun 2023 sebagai berikut :

Pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang masuk dalam kategori **Berhasil** dan **Sangat Berhasil** adalah pencapaian pada sasaran:

1. Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan merupakan sasaran dengan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil dan capaian kerjanya mengalami peningkatan. Program-program yang mendukung capaian ini adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terutama dukungan kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota dan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota yang merupakan upaya pemenuhan SPM urusan Kesehatan. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian bayi mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya yang mendukung peningkatan kinerja daerah. Selain itu berkat kolaborasi dan komitmen Kabupaten Gowa untuk bersama-sama dalam penanganan *stunting*, Angka harapan hidup juga meningkat sebesar 70,70 sehingga indeks kesehatan meningkat. Akan tetapi dengan meningkatnya umur harapan hidup maka perlu diperhatikan penanganan lanjut usia dan rasio ketergantungan lansia. Selain itu beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan ini antara lain seperti Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Bontompo, Pembangunan Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf dan pembangunan puskesmas Rawat inap pada semua kecamatan.
2. Sasaran meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah dengan indikator Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan) dikategorikan sangat berhasil dan capaian kerjanya mengalami peningkatan. Beberapa program yang diharapkan bisa meningkatkan Capaian sasaran ini pada tahun 2023 antara



- lain: program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, program penyuluhan pertanian dan program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
3. Sasaran Meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dikategorikan **sangat berhasil** karena realisasi tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Gowa tahun 2023 sebesar 3,43 persen **lebih rendah** dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 sebesar 5 persen, hal ini didukung oleh beberapa program antara lain : program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan program hubungan industrial.
 4. Sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan dikategorikan **berhasil** dengan capaian kinerjanya **99,43 persen**, realisasi kinerja 66,12 poin sudah mendekati target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 66,50 poin dan indikator indeks pendidikan menunjukkan trend peningkatan ditahun 2023 dari tahun 2022 sebesar 65,94 poin. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari berbagai Inovasi bidang Pendidikan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gowa seperti Program Mahasantri, Sistem Kelas tuntas Berkelanjutan, Pendidikan gratis, investasi SDM Seperempat Abad, Satu Desa/Kelurahan Satu Sarjana, PAUD SPAS dan Perpustakaan Desaserta Imtaq Indonesia.
 5. Sasaran Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat dengan indikator Gini Ratio dikategorikan berhasil dengan capaian kinerjanya 93,33 persen, realisasi kinerja 0,32 sudah mendekati target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 0,30 poin dan indikator gini ratio menunjukkan ketimpangan ekonomi di Kabupaten Gowa semakin kecil ditahun 2023 dari tahun 2022 sebesar 0,36 poin. Program yang mendukung adalah Upaya optimalisasi peran serta puskesmas dan



memaksimalkan *update* data kemiskinan ekstrem *by name, by address* dan *by needs* sehingga penanganannya dapat optimal sesuai kebutuhan dan dapat mengentaskan kemiskinan. Selain itu sebagai bentuk kolaborasi antar Perangkat Daerah agar terjadi kesinambungan program dan kegiatan pemerintah dengan pengentasan kemiskinan, maka *update* data kesejahteraan sosial yang akan dijadikan DTKS menjadi data/objek/kelompok sasaran setiap kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Isu strategis kemiskinan dijadikan prioritas untuk diselesaikan secara bersama *cross cutting* pada perencanaan berikutnya. Setiap Perangkat Daerah mengetahui peran dan irisan/kolaborasi yang dilakukan untuk turut menangani kemiskinan. Sehingga diharapkan penanganan kemiskinan menjadi terpadu efektif dan efisien;

6. Sasaran Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan dengan indikator indeks Desa membangun dikategorikan sangat berhasil dan capaian kinerjanya mengalami peningkatan. Secara umum beberapa hal yang mendorong ketercapaian sasaran ini di kabupaten Gowa adalah meningkatnya status kemajuan kemandirian desa yang tidak terlepas dari dukungan program peningkatan kerja sama desa, program administrasi pemerintahan desa program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
7. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup memiliki capaian kinerja yang berhasil dengan capaian sebesar 92,91 persen dengan realisasi sebesar 65,04 (Sedang) walaupun masih berada dibawah yang ditargetkan sebesar 70-80 (Baik). Beberapa program yang mendukung keberhasilan sasaran ini adalah : program perencanaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI), program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3), program pembinaan dan pengawasan



terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penanganan pengaduan lingkungan hidup dan program pengelolaan persampahan;

8. Sasaran meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator nilai SAKIP dan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan nilai LPPD dengan capaian 95,18 persen kategori berhasil. Beberapa program yang mendukung kegiatan ini antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh semua Perangkat Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan kecamatan, Program Penyelenggaraan Pengawasan serta pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan inspektorat, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah melalui Forum Lintas Perangkat Daerah dengan seluruh stakeholder yang dilakukan Bappeda dalam rangka kolaborasi/cross cutting menyelesaikan isu strategis daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka menjaga keselarasan dan konsistensi perencanaan dengan penganggaran. Selain itu peningkatan PAD terus diupayakan menuju kemandirian fiskal. Dalam rangka perbaikan kinerja, maka diperlukan perencanaan yang efektif menyelesaikan gap kinerja dan permasalahan aktual. Oleh karena itu pada penyusunan perencanaan tahun 2024 diupayakan perbaikan dengan melaksanakan forum lintas Perangkat Daerah bersama stakeholder dengan cross cutting pada isu strategis yang terdapat di RKPD dan tematik cross cutting arah kebijakan tahun pertama dan permasalahan aktual.



9. Sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan indikator indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan pemuda dikategorikan berhasil dengan capaian sebesar 99,72, hal ini karena dukungan beberapa program di antaranya program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dan program pengembangan kapasitas kepramukaan.
10. Sasaran terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi dengan indikator indeks infrastruktur daerah dikategorikan berhasil dengan capaian sebesar 96,50 persen. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dengan konsisten mengalokasikan anggaran infrastruktur 20 persen bahkan pelambatan pembangunan infrastruktur akibat refocusing kegiatan akibat Covid 19 diupayakan dengan melakukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Beberapa program yang dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran ini antara lain program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), program penyelenggaraan jalan, program penyelenggaraan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, program kawasan permukiman, program penataan bangunan dan lingkungannya, program penataan bangunan gedung, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengelolaan sumber daya air (SDA), program pengembangan jasa konstruksi.

Sedangkan pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang belum berhasil mencapai target adalah pada sasaran:

1. Sasaran berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang



mampu dengan indikator persentase penduduk miskin dengan capaian kinerja 81,33 persen walaupun persentase penduduk miskin Kabupaten Gowa mengalami penurunan dari 7,36 pada tahun 2022 menjadi 7,36 di tahun 2023. Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah : program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana serta program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik. Capaian kinerja indeks pelayanan Kabupaten Gowa tahun 2023 hanya sebesar 82,79 dengan realisasi IPP sebesar 3,32 dari range nilai IPP 4,01-4,50 (A-) yang ditargetkan, sementara itu realisasi IPP 2 tahun terakhir juga mengalami trend penurunan yaitu 4,02 pada tahun 2021, nilai 4,00 di tahun 2022 dan nilai 3,32 di tahun 2023. Faktor utama Indeks Pelayanan Publik 2023 tidak berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan dan trend kinerjanya menurun adalah karena pada penilaian IPP tahun 2023 menjadikan Kecamatan sebagai sampel untuk Pelayanan Administrasi. Kondisi Pelayanan Publik di Kecamatan Kabupaten Gowa saat ini dihadapkan pada berbagai masalah karena 9 dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gowa.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa *“Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

Oleh karena itu, maka pada hakekatnya sesuai dengan aturan tersebut di atas, tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, dimana pelaksanaannya tercermin dari adanya kontribusi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi pemberi tugas pembantuan, dalam hal pembiayaan pembangunan.

3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA

Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dituangkan dalam bentuk penyerahan tugas pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara umum untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kabupaten Gowa.

Sumber pembiayaan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan jumlah anggaran yang bervariasi sesuai formula tersebut. SKPD yang bertanggungjawab dalam pengalokasian dan penatausahaan program ini terletak pada dua (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gowa.

Urusan pemerintahan yang ditugaspembantukan kepada Kabupaten Gowa meliputi peningkatan usaha ekonomis produktif, pemeliharaan dan pemupukan semangat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan, penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan stimulan gotong royong. Sarana dan prasarana pendukung yang diberikan antara lain dengan perbaikan dan pembangunan sarana/prasarana serta dukungan ketersediaan operasional.

Adapun Tugas-tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada periode tahun 2023, menurut masing-masing pelaksana teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa;
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa;

**Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023**

No.	KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Kementerian Pertanian	Bantuan Pemerintah (Bapem)	Optimasi Lahan	Irigasi Perpompaan	Kecamatan Parigi	Rp.142.125.000,-	Rp.142.125.000,-
		Bantuan Pemerintah (Bapem)	Optimasi Lahan	Irigasi Perpompaan	Kecamatan Bontolempangang	Rp.142.125.000,-	Rp.142.125.000,-
2	Kementerian Ketenagakerjaan	Peningkatan, Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pelatihan Penjahitan Pakaian Dengan Mesin (6 Paket) dan Pelatihan Junior Make-Up Artist (6 Paket)	UPT BLK Gowa	Rp.722.165.000,-	Rp.641.157.049,-



3.2 TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA

Tugas pembantuan yang diberikan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tidak ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang melaksanakan.



BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, maka Dinas Pendidikan menerapkan Standar Pelayanan Minimal yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan terdiri dari 3 jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Pendidikan Dasar, dengan indikator jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs);
2. Pendidikan Kesetaraan, dengan indikator jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan;
3. Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikator jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

4.1.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Pendidikan menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.

4.1.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :

Tabel 4.1 Realisasi SPM Urusan Pendidikan

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		TARGET SPM	REALISASI SPM
I	PENDIDIKAN DASAR		
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	73.53%
II	PENDIDIKAN KESETARAAN		
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	98.13%
III	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	91.40%

4.1.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp 137.126.428.130,00.



4.1.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan pendidikan sebanyak 54 orang yang terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional umum.

4.1.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. **Permasalahan utama yang dihadapi yaitu :**
 - a. Masih rendahnya akses penduduk usia sekolah mendapatkan pendidikan disebabkan kondisi layanan pendidikan antar kecamatan belum berimbang.
 - b. Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
2. **Solusi yang ditempuh yaitu :**
 - a. Peningkatan akses layanan pendidikan sekaligus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang merata.
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu fokus dan indikator dalam pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dinas Kesehatan merupakan organisasi perangkat daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 12 jenis pelayanan dengan 12 indikator utama :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, dengan indikator jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, dengan indikator jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, dengan indikator jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan;
4. Pelayanan Kesehatan Balita, dengan indikator jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, dengan indikator jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, dengan indikator jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, dengan indikator jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, dengan indikator jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, dengan indikator jumlah warga negara penderita *Diabetes Mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan;



10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, dengan indikator jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan;
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis (TB), dengan indikator jumlah warga negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan;
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*human immunodeficiency virus*), dengan indikator jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan.

4.2.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Kesehatan menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.

4.2.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :

Tabel 4.2 Realisasi SPM Urusan Kesehatan

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		TARGET SPM	CAPAIAN SPM
I	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL		
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	96.63%
II	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN		
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	97.26 %
III	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR		
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	97.37 %
IV	PELAYANAN KESEHATAN BALITA		
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93.77 %
V	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR		
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93.87 %
VI	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF		
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	92.58 %
VII	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT		
7	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	96.61 %
VIII	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI		



8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	92.50 %
IX	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS		
9	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93.41 %
X	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT		
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	86.28 %
XI	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKOLOSIS (TB)		
11	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	90.29 %
XII	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)		
12	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	86.45 %

4.2.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp 182.712.656.191,00.

4.2.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan kesehatan sebanyak 900 orang yang terdiri dari pejabat struktural, tenaga medis/kesehatan serta pejabat fungsional umum.

4.2.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat pentingnya pola hidup sehat.
- 2) Masih rendahnya tingkat pengetahuan keluarga tentang cakupan makanan yang bergizi.
- 3) Masih tingginya angka kematian bayi.

2. Solusi yang ditempuh yaitu :

- 1) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pola hidup sehat.
- 2) Peningkatan promosi dan preventif bagi masyarakat akan pentingnya makanan yang bergizi bagi usia dini.
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan anak.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.3.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menerapkan Standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum



dan penataan ruang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar dan 2 indikator yaitu :

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari;
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.

4.3.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :

Tabel 4.3 Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		TARGET SPM	CAPAIAN SPM
I	PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI		
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100%	100%
II	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK		
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%

4.3.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp 210,786,299,327,00,-.

4.3.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebanyak 112 orang yang terdiri dari 29 pejabat struktural dan pejabat fungsional umum.

4.3.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan yang dihadapi yaitu :
 - 1) Masih rendahnya pelayanan sanitasi bagi rumah tangga.
 - 2) Belum tersedianya lahan untuk TPU.
 - 3) Masih terdapatnya kawasan permukiman yang minim sarana dan prasarana sanitasi yang layak.



- 4) Rendahnya kesadaran/peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran drainase.

2. Solusi yang ditempuh :

- 1) Peningkatan cakupan rumah tangga yang mengakses sanitasi.
- 2) Pengadaan lahan untuk TPU.
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.
- 4) Pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.4.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan yang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peruntukkan lahan yang berwawasan lingkungan, nyaman, sehat dan aman.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menerapkan Standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar dan 2 indikator yaitu :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

4.4.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.

4.4.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :

Tabel 4.4 Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		TARGET SPM	CAPAIAN SPM
I	PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG		



	LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA		
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
II	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%

4.4.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp90,017,000,00,-.

4.4.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebanyak 31 orang yang terdiri dari 12 pejabat struktural dan pejabat fungsional umum.

4.4.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Masih rendahnya kualitas rumah di Kabupaten Gowa.
- 2) Masih terdapatnya kawasan permukiman yang minim sarana dan prasarana sanitasi yang layak.
- 3) Rendahnya kesadaran/peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas umum.

2. Solusi yang ditempuh :

- 1) Peningkatan cakupan rumah yang berkualitas dan terjangkau.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.
- 3) Peningkatan akses kawasan permukiman melalui Program Kota Tanpa Kumuh.
- 4) Komitmen penganggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum.

4.5 URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Standar pelayanan minimal bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dengan 5 indikator yaitu :



1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada;
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Dasar pada Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Dasar pada Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Dasar pada Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Pemadam Kebakaran menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.

4.5.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :

Tabel 4.5 Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		TARGET SPM	CAPAIAN SPM
I	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	94,51%
II	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA		
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
III	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA		
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%



IV	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA		
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
V	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN		
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	95,71%

4.5.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp. 14,248,944,628,-.

4.5.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebanyak 79 orang yang terdiri dari 48 orang dari Satuan Polisi Pamong Praja, 15 orang dari Dinas Pemadam Kebakaran serta 16 orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4.5.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Masih rendahnya jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.
- 2) Sosialisasi Peraturan Daerah yang masih kurang ke pedagang kaki lima dan pedagang asongan.
- 3) Masih terdapatnya bencana kebakaran yang tidak memenuhi *respon time* disebabkan karena lokasi yang jauh dari pos jaga pemadam kebakaran.

2. Solusi yang ditempuh :

- 1) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah.
- 2) Membentuk UPT Pemadam Kebakaran di beberapa kecamatan untuk memenuhi *respon time*.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Dinas Sosial merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dan 5 indikator, yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti, dengan indikator jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti, dengan indikator jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti, dengan indikator jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;



4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti, dengan indikator jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
5. Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

4.6.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Sosial menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.

4.6.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :

Tabel 4.6 Realisasi SPM Urusan Sosial

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		TARGET SPM	CAPAIAN SPM
I	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI		
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
II	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI		
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
III	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI		
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
IV	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI		
4	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	20%
V	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DAN PASCA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA		
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

4.6.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp 279,189,614,00,-.

4.6.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan sosial sebanyak 29 orang dengan 19 pejabat struktural



dan pejabat fungsional umum lainnya ditambah dengan 295 pekerja sosial professional/tenaga kerja sosial.

4.6.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Masih relatif tingginya angka kemiskinan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan masalah sosial lainnya.
- 2) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang bergerak pada penanganan masalah kesejahteraan sosial.

2. Solusi yang ditempuh :

- 1) Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui program dan kegiatan secara terpadu di berbagai sektor pembangunan.
- 2) Peningkatan minat dan kepedulian sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gowa tahun 2023, ditunjang dengan program / kegiatan dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan. Adapun program / kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk setiap Bidang / Urusan adalah sebagai berikut :

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Program / Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan adalah :

- a. Program Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
- b. Program Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- c. Program Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- d. Program Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Program / Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah :

- a. Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.
- b. Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.
- c. Program Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir.
- d. Program Pelayanan Kesehatan Balita.
- e. Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar.
- f. Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif.
- g. Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut.



- h. Program Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.**
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.**
- j. Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.**
- k. Program Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.**
- l. Program Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).**

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program / Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- a. Program Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - hari.**
- b. Program Kegiatan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.**

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program / Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

- a. Program Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota.**
- b. Program Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.**

E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program / Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah :

- a. Program Kegiatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM).**



- b. Program Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN).**
- c. Program Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN).**
- d. Program Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN).**
- e. Program Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR).**

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

Program / Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah :

- a. Program Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial.**
- b. Program Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial.**
- c. Program Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial.**
- d. Program Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.**
- e. Program Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.**



BAB V P E N U T U P

Pemerintah Daerah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, sekaligus sebagai penyelenggara utama pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di daerah. Perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan perkembangan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, Pemerintah Daerah diwajibkan membuat dan menyampaikan capaian kinerja tahunan kepada Pemerintah dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan secara umum bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2023 mencapai kinerja cukup memuaskan, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, regulasi maupun anggaran.

Atas capaian kinerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Gowa dalam kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa, serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gowa yang telah memberikan support dan partisipasi konstruktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gowa. Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gowa Tahun 2023 ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui tahapan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa. Dengan harapan laporan ini dapat menjadi referensi dan sekaligus bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun yang akan datang.